



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
(BPPKAD)
KABUPATEN KUDUS
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Telp. (0291) 431328, Fax. (0291) 434353
KUDUS 59313**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) tahun 2023 merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (Renja) BPPKAD secara normatif disusun untuk memenuhi tahapan dalam penyediaan dokumen perencanaan suatu Perangkat Daerah. Tata cara, sistematika dan substansi penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, daerah melakukan percepatan melalui integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ada keterkaitan SIPD dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. SIPD adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam upaya untuk memenuhi informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah serta informasi lainnya. Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan untuk memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.

Pada Tahun Anggaran 2021, SIPD sudah digunakan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggarannya. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Rencana Kerja (Renja) BPPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai dasar acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 menggunakan SIPD.

Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui hasil capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja PD. Renja BPPKAD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD-BPPKAD bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan sasaran meningkatnya PAD, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Prioritas peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran BPPKAD.
2. Penting dan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas BPPKAD yang harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Alokasi anggaran Renja Perangkat Daerah-BPPKAD Tahun 2023 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kriteria yaitu :

1. Mendukung terselenggaranya pemerintahan secara rutin.
2. Mendukung tujuan dan sasaran BPPKAD.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Mendukung dan mempercepat tercapainya target kinerja kegiatan.

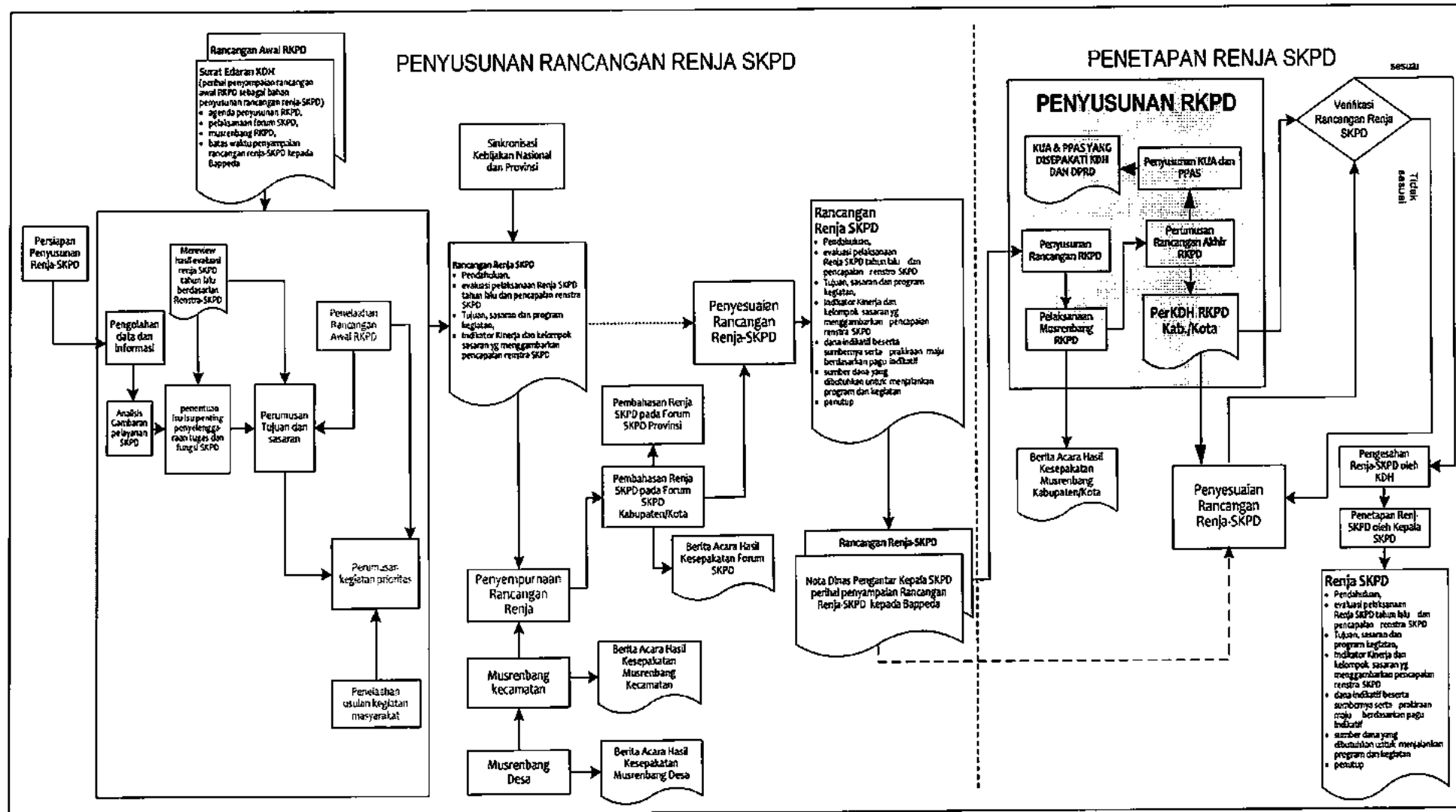
Proses penyusunan Renja PD dimulai dari :

1. Persiapan penyusunan Renja PD
2. Penyusunan rancangan awal Renja PD
3. Penyusunan rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan forum PD/lintas PD
5. Perumusan rancangan akhir Renja PD
6. Penetapan Renja PD

Adapun alur Proses Tahapan Penyusunan Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1

Bagan Alur Proses Tahapan Penyusunan Renja SKPD



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99),
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
 28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 71);
 29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 23).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan :

1. Pedoman bagi pelaksana kegiatan BPPKAD Kabupaten Kudus untuk menyusun RKA-SKPD Tahun 2023;
2. Dasar usulan program dan kegiatan BPPKAD Tahun 2023;
3. Memudahkan pengukuran kinerja atau penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
4. Adanya komitmen dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 yang meliputi :

- Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPPKAD
- Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKAD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal BPPKAD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPPKAD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKAD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah untuk mendukung penguatan daya saing ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Strategi kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 merupakan bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan untuk membangun basis pendapatan yang kuat menuju kemandirian fiskal daerah. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 disusun selaras dengan RPJMD untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Namun demikian, pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadi beberapa perbedaan dikarenakan tidak semua asumsi yang digunakan dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 dapat terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, analisis proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu kebijakan di bidang keuangan negara, asumsi indikator makro ekonomi, dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Data historis indikator ekonomi makro dan data realisasi pendapatan daerah secara bersama akan membentuk angka pengganda untuk masing-masing obyek pendapatan. Angka pengganda tersebut dikombinasikan dengan data potensi digunakan dalam penyusunan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah. Berdasarkan proyeksi tersebut, dan dengan memperhatikan kebijakan keuangan negara dan bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, akan disusun target pendapatan daerah tahun anggaran 2023 untuk masing-masing jenis pendapatan daerah.

Rerata pertumbuhan pendapatan daerah periode 2019-2021 sebagaimana dalam Tabel 2.1 menunjukkan angka sebesar 1,33%. Pertumbuhan positif pendapatan daerah ini disumbang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami pertumbuhan sebesar 21,82%. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami perlambatan sebesar -2,72% dan -13,58%. Pertumbuhan PAD pada dasarnya terjadi karena beberapa hal, yaitu penyesuaian nilai jual obyek pajak, penurunan persentase kompensasi pajak daerah, dan upaya pemantauan transaksi perpajakan daerah melalui pemasangan perangkat pemantau elektronik pada sebagian obyek pajak hotel, restoran, dan hiburan. Namun, kenaikan tertinggi dialami akun Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 31,30%. Kenaikan ini bersifat temporer karena bersumber dari penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 yang pada pertengahan tahun 2021 terjadi peningkatan kasus yang cukup banyak di Kabupaten Kudus. Meskipun PAD bertumbuh positif, kenaikan tersebut tidak bisa menutupi penurunan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer. Hal ini karena proporsi Pendapatan Transfer yang dominan dalam struktur APBD Kabupaten Kudus. Hal ini juga menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah karena tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer antar pemerintahan. Di sisi lain, pertumbuhan negatif realisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terjadinya akibat kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatasi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 melalui pemotongan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Tabel. 2.1
Rerata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021

URAIAN	REALISASI			
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	r (%)
PENDAPATAN	2.090.430.364.413,00	2.016.176.986.239,00	2.141.479.591.237,97	1,33%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	343.824.122.868,00	383.892.971.961,00	506.702.739.014,97	21,82%
Pendapatan Pajak Daerah	125.762.587.800,00	126.240.575.956,00	148.813.882.259,00	9,13%
Hasil Retribusi Daerah	20.058.448.046,00	18.494.546.780,00	25.752.831.044,97	15,72%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.277.166.654,00	8.704.409.157,00	8.371.225.490,00	-5,00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.725.920.368,00	230.453.440.068,00	323.764.800.221,00	31,30%
PENDAPATAN TRANSFER	1.676.579.317.018,00	1.562.392.880.256,00	1.583.730.741.223,00	-2,72%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.298.060.004.624,00	1.183.590.147.772,00	1.228.457.921.971,00	-2,51%
Dana Bagi Hasil	209.525.165.300,00	216.676.209.702,00	254.976.092.494,00	10,54%
Dana Alokasi Umum (DAU)	851.036.584.000,00	757.097.370.000,00	747.504.503.000,00	-6,15%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	237.498.255.324,00	209.816.568.070,00	225.977.326.477,00	-1,98%
Dana Insentif Daerah	56.420.303.000,00	89.301.426.000,00	24.112.366.000,00	-7,36%
Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	136.723.311.800,00	147.823.461.000,00	151.037.149.800,00	5,15%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.375.697.594,00	141.677.845.484,00	180.123.303.452,00	1,78%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	154.196.848.594,00	133.004.610.484,00	175.804.285.452,00	9,22%
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	31.178.849.000,00	8.673.235.000,00	4.319.018.000,00	-61,19%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.026.924.527,00	69.891.134.022,00	51.046.111.000,00	-13,58%
Pendapatan Hibah	70.026.924.527,00	69.891.134.022,00	51.046.111.000,00	-13,58%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Proyeksi pendapatan daerah TA 2023 diperkirakan sebesar Rp1.729.161.588.000. Target ini mengalami kenaikan sebesar Rp80.345.517.000,00 (4,87%) dibanding RKPD Tahun 2022 yang sebesar Rp1.648.816.071.000. Kenaikan tersebut disumbang dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Proyeksi pendapatan daerah TA 2023 disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perbandingan Pendapatan Daerah Dalam
RKPD 2022 dan Proyeksi 2023

URAIAN	RKPD 2022	PROYEKSI 2023	Selisih
PENDAPATAN	1.648.816.071.000	1.729.161.588.000	4,87%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	376.107.160.000	410.998.331.000	9,28%
Pendapatan Pajak Daerah	139.920.956.000	162.510.725.000	16,14%
Hasil Retribusi Daerah	23.268.805.000	26.196.000.000	12,58%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.477.515.000	8.028.327.000	-5,30%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	204.439.884.000	214.263.279.000	4,81%
PENDAPATAN TRANSFER	1.272.708.911.000	1.318.163.257.000	3,57%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.132.196.098.000	1.144.806.286.000	1,11%
Dana Bagi Hasil	233.522.007.000	246.132.195.000	5,40%
Dana Alokasi Umum	747.504.503.000	747.504.503.000	0,00%
Dana Alokasi Khusus	0	-	0,00%
Dana Insentif Daerah	0	-	0,00%
Dana Desa	151.169.588.000	151.169.588.000	0,00%
Pendapatan Transfer Antar-Daerah	140.512.813.000	173.356.971.000	23,37%
Pendapatan Bagi Hasil	140.512.813.000	173.356.971.000	23,37%
Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0,00%
Pendapatan Hibah	0	0	0,00%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Tabel 2.2 menunjukkan hampir semua jenis PAD mengalami kenaikan kecuali pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang mengalami penurunan sebesar 5,30%. Kenaikan pada akun Pendapatan Pajak Daerah diperkirakan bersumber dari penyesuaian nilai jual obyek pajak, pengurangan kompensasi pajak, dan penerapan pemantauan pelaporan pajak secara elektronik (*tapping box*). Selain itu, kondisi ekonomi yang mulai bertumbuh di tahun 2022 dan diperkirakan sudah pulih pada tahun 2023 akan menyumbang pada kenaikan pajak daerah khususnya pajak-pajak yang dipengaruhi oleh mobilitas sosial masyarakat. Hal yang sama berlaku pada kenaikan Hasil Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Asumsi pemulihan ekonomi yang berjalan lancar juga berlaku untuk kenaikan pada akun Pendapatan Transfer, khususnya DBH dan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi. DAU diasumsikan tetap karena adanya perubahan formula pengalokasian yang diatur dalam UU 1/2022 dan kebijakan *hold harmless* dalam alokasi TKD beberapa tahun ke depan. Hal yang sama

diasumsikan berlaku untuk Dana Desa. Adapun DAK, meskipun berdasarkan usulan daerah, namun riwayat pendapatan DAK selama ini relatif tetap. Hal ini juga dipengaruhi tidak adanya lokasi Prioritas Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kudus. Adapun DID tidak dialokasikan karena karakteristik DID yang dinilai berdasarkan kinerja Pemda tahun sebelumnya dan kinerja relatif Pemda-Pemda seluruh Indonesia.

Secara umum, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komponen pendapatan. Untuk kebijakan pada akun Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan daerah sesuai peraturan perundangan-perundangan. Kedua, optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pusat dan instansi vertikal. Ketiga, optimalisasi juga dilakukan dengan menjaga kelancaran arus data dan komunikasi antara pusat dan daerah.

Adapun kebijakan pada akun PAD dilaksanakan secara bijaksana melalui beberapa langkah. Pertama, kebijakan ini diwujudkan dengan perluasan cakupan penegakan pemungutan pajak daerah untuk memenuhi harapan atas rasa keadilan wajib pajak. Kedua, penetapan harga yang wajar terhadap obyek pajak. Ketiga, pemberian insentif dan apresiasi kepada wajib pajak. Keempat, penggunaan teknologi informasi dan perluasan penerapan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah. Kelima, penguatan kapasitas pemungutan pajak daerah. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan penyediaan layanan publik secara berkesinambungan kepada masyarakat. Secara rinci, kebijakan optimalisasi PAD dilakukan sebagai berikut:

1. Menyusun dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU 1 Tahun 2022;
2. Menyusun kajian potensi secara bertahap untuk masing-masing jenis pendapatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan;
3. Melakukan pendataan dalam rangka pemutakhiran dan penyesuaian nilai obyek pajak berdasarkan harga yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menerapkan kebijakan pemberian penghargaan bagi wajib pajak dan/atau wajib pungut guna meningkatkan kepatuhan perpajakan;
5. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan BUMD dan BLUD guna menghasilkan pendapatan daerah yang optimal;

6. Melaksanakan pengelolaan piutang pajak yang efektif;
7. Meminimalkan kebocoran pendapatan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah;
8. Memperluas pemasangan alat pemantau transaksi elektronik yang dapat menjangkau wajib pajak yang lebih luas;
9. Mengembangkan jaringan sistem informasi pendapatan melalui sinkronisasi dan/atau integrasi antar jenis pendapatan maupun dengan sistem lain terkait;
10. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai;
11. Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan mitra pemerintah daerah dalam rangka mensinergikan kebijakan optimalisasi pendapatan daerah.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sesuai dengan program prioritas daerah, optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas serta pengalokasian kebutuhan belanja secara rasional, terukur dan terarah. Adapun kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dari visi misi dan program prioritas daerah.
2. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Kudus untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
3. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilakukan;
4. Sinkronisasi pembangunan dengan prioritas nasional dan provinsi.
5. Pemenuhan belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah, belanja kesehatan sekurang-kurangnya 10 % dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan, belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 25 % dari dana transfer yang bersifat umum. Sedangkan *mandatory* untuk pelatihan ASN (sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah) dan anggaran pengawasan (APIP) sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

6. Kesiapsiagaan terhadap bencana, baik alam maupun non alam.
7. Mengakomodir usulan pembangunan dari pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan melalui aplikasi e-pokir dengan tetap memperhatikan kapasitas kemampuan keuangan daerah, kewenangan, prioritas pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemenuhan belanja untuk persiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

Belanja pada tahun 2023 diproyeksikan dalam tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2023

No	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	% Pertumbuhan
1	Belanja Operasi	1.599.828.920.350	1.456.802.022.564	-8,94
2	Belanja Modal	264.636.722.153	128.440.524.366	-51,47
3	Belanja Tak Terduga	11.331.558.080	4.000.000.000	-64,70
4	Belanja Transfer	262.980.395.000	278.690.057.000	5,97
	Jumlah Belanja Daerah	2.138.777.595.583	1.867.932.603.930	-12,66

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Belanja daerah diproyeksikan turun sebesar 12,66%, dengan perincian untuk belanja operasi turun sebesar 8,94%, belanja modal turun sebesar 51,47%. belanja tak terduga turun 64,7% dan belanja transfer naik sebesar 5,97%. Turunnya proyeksi belanja di tahun 2023 antara lain disebabkan karena belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus belum teralokasikan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, BPPKAD Kabupaten Kudus melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 507.243.117.542 mengalami kenaikan sebesar Rp. 139.923.811.153 dari target sebesar Rp. 367.504.398.000 dibandingkan realisasi PAD tahun 2020 dari sebesar Rp. 343.827.208.844. Kenaikan tersebut

bersumber dari pajak daerah sebesar Rp. 148.636.766.896, sisanya disumbang dari retribusi daerah Rp. 25.754.628.244 dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 324.665.586.523.

Sedangkan anggaran belanja BPPKAD tahun 2021 terdapat penambahan yang cukup besar Rp.290.607.159.000 karena BPPKAD melaksanakan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, pengelolaan penyaluran Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Bagi Hasil Kabupaten. BPPKAD melaksanakan 4 program, melalui 13 kegiatan, dengan realisasi belanja TA. 2021 sebesar Rp.295.819.389.666 atau 96,63% dari target anggaran sebesar Rp. 306.116.004.547. Belanja BPPKAD terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 14.973.091.636 dan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.3.774.119.704. Adapun realisasi belanja yang tidak memenuhi target yaitu :

- a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan yang direncanakan adalah :
 - Program Penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah untuk Kegiatan Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam (45,51%) karena untuk proses cetaknya tidak tercetak semua, tetapi yang dicetak hanya yang ada perubahannya.
- b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
 - Program pelayanan administrasi umum yang meliputi peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja, pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sertapeningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur, yang

meliputi kegiatan sarana prasarana aparatur telah memenuhi target yaitu pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

- Program Peningkatan Pendapatan Daerah, yang meliputi kegiatan Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah, Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah serta Operasional pengelolaan UPTD pengelola pajak daerah.
 - Program Fasilitasi dan Penyusunan Anggaran Daerah, yang meliputi Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya serta Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
 - Program Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah, yang meliputi Fasilitasi penatausahaan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya serta Fasilitasi penatausahaan dan akuntansi daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
 - Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, yang meliputi Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah serta penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD.
 - Program Pengelolaan Aset Daerah, yang meliputi Perencanaan dan analisis kebutuhan aset daerah, peningkatan manajemen aset/ barang daerah serta pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Adapun realisasi program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus di Tahun Anggaran 2021 yang melebihi target kinerja adalah Program Peningkatan Pendapatan Daerah. Realisasi Pendapatan BPPKAD sebesar Rp. 156.210.415.406 atau 121,59% dari target anggaran sebesar Rp. 128.468.031.000. Realisasi pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.883.769.643 atau naik sebesar 1,88% dibandingkan realisasi pendapatan TA. 2020 sebesar Rp.153.326.645.763. Realisasi pendapatan dapat melampaui target disebabkan bertambahnya obyek pajak baru, adanya kebijakan

reklasifikasi obyek PBB P2 yang ditetapkan dan kesadaran membayar pajak dari wajib pajak dan wajib retribusi.

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja Program Penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah untuk Kegiatan Penyusunan buku sistem dan prosedur akuntansi (45,51%) karena untuk proses cetaknya tidak tercetak semua, tetapi yang dicetak hanya yang ada perubahannya, menyesuaikan kebutuhan.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, tidak ada justru efisiensi biaya anggaran cetak.
- f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Penatausahaan dan Akuntansi Daerah, kegiatan penyusunan buku sistem dan prosedur akuntansi lebih cermat dalam perencanaan dan penganggarannya.

Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 (tahun berjalan) sebagaimana tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus.

Analisis kinerja pelayanan BPPKAD memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) sebagaimana tabel 2.2.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Kudus.

Berdasarkan sesuai tugas pokok dan fungsi BPPKAD dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah, isu- isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya kondisi perekonomian akibat dampak covid 19 yang terjadi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mengalami penurunan, karena adanya beberapa kebijakan insentif perpajakan daerah. Penurunan tersebut dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir. Selain itu dari penerimaan retribusi daerah turun drastis (50%) dari target.
- b. Optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi akibat dampak covid 19 guna mendukung kondusivitas sektor usaha.

- c. Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, mengikat dan prioritas. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan upaya refocusing pada program dan kegiatan di OPD-OPD untuk mendukung penguatan perekonomian masyarakat.
- d. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih pada tataran perencanaan dan penganggaran, belum sampai ke penatausahaan.
- e. Masih ada beberapa OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan anggaran berbasis kinerja, dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan anggaran menumpuk diakhir tahun.
- f. Keterlambatan OPD dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan OPD harus sudah dikirim kepada Bupati melalui PPKD.
- g. Belum optimalnya pemanfaatan, pendayagunaan dan pengelolaan aset-aset daerah.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Untuk menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada, BPPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Dalam rancangan awal Renja BPPKAD 2023, sebagaimana yang telah tercantum dalam RKPD Tahun 2023, maka direncanakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 65 sub. kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 308.879.462.144 sebagaimana tabel 2.3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

Sebagai telaahan Rancangan Awal RKPD 2023 terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4.

Dalam rangka penyusunan RKPD 2023, selain identifikasi kemampuan keuangan daerah, analisis kontribusi, dan perkembangan PDRD perlu dipertimbangkan juga rerata pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir Dalam rangka penyusunan RKPD 2022, selain identifikasi kemampuan keuangan daerah, analisis kontribusi, dan perkembangan PDRD perlu dipertimbangkan juga rerata pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2021

NOMOR URUT	URAIAN	Realisasi			r(%)
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.090.430.364.413	2.016.176.986.239	2.163.634.437.714	1,88
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	343.824.122.868	383.892.971.961	507.167.074.775	21,88
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	125.762.587.800	126.240.575.956,00	148.636.888.496,00	9,06
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.058.448.046	18.494.546.780,00	25.982.223.385,00	16,34
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.277.166.654	8.704.409.157,00	8.371.225.490,00	(5,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	188.725.920.368	230.453.440.068,00	324.176.737.404,00	31,39
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.298.060.004.624	1.183.590.147.772	1.239.890.567.326	(2,03)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	209.525.165.300	216.676.209.702	266.648.798.149	13,24
1.2.2	Dana Alokasi Umum	851.036.584.000	757.097.370.000	747.504.503.000	(6,15)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	237.498.255.324	209.816.568.070	225.737.266.177	(2,03)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	448.546.236.921	448.693.866.506	416.576.795.613	(3,56)
1.3.1	Pendapatan Hibah	70.026.924.527	69.891.134.022	5.590.390.884	(46,10)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	154.196.848.594	133.004.610.484	166.347.501.424	5,66
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	193.143.614.800	89.301.426.000	24.112.366.000	(63,38)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.178.849.000	8.673.235.000	4.319.018.000	(61,19)
2.3.6	Pendapatan Lainnya	-	147.823.461.000	151.037.149.800	-
2.3.7	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	65.170.369.505,00	-

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Berdasarkan Tabel tersebut, rata-rata realisasi pendapatan daerah 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,88%. Kondisi ini berlaku untuk semua jenis PAD kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah). Untuk Dana Perimbangan, seluruh jenis Dana Perimbangan mengalami penurunan kecuali Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan kecuali Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya. Pertumbuhan negatif rata-rata realisasi pendapatan daerah periode ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang memaksa adanya penyesuaian pendapatan di hampir semua level pemerintahan pada tahun anggaran 2020. Penurunan drastis pada tahun 2020 membalikkan pertumbuhan positif yang dialami pada tahun-tahun sebelumnya.

Rasio pajak daerah mencapai 6,87% pada tahun 2021 yang berarti meningkat sebesar 0,61% dibanding rasio pajak daerah tahun 2020. Kenaikan pendapatan pajak daerah selain didukung adanya peningkatan pendapatan, juga karena adanya penurunan total pendapatan khususnya yang bersumber dari Dana Perimbangan. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan antara lain dengan penyesuaian NJOP, pendataan obyek pajak, dan penataan administrasi pendapatan pajak daerah dengan penggunaan teknologi informasi antara lain melalui integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah, integrasi data perizinan dan perpajakan daerah, dan pemasangan alat pemantauan transaksi pajak secara elektronik.

Di sisi lain, jumlah wajib pajak pun mengalami kenaikan di hampir semua jenis pajak daerah sebagaimana pada tabel di bawah ini yang menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak daerah di Kabupaten Kudus pada kurun waktu 2017-2021. Terdapat beberapa perbedaan terkait jumlah wajib pajak dibandingkan dengan data sebelumnya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena beberapa hal antara lain perbedaan sistem, titik pengambilan, dan basis data yang belum dimutakhirkan.

Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Kudus 2017-2022

No.	Jenis Pajak	2017	2018	2019	2020	2021
1	PBB P2	381.358	384.376	388.186	391.915	394.722
2	BPHTB	2.468	2.882	3.912	4.243	4.840
3	PPJ	214.481	239.189	247.996	253.465	278.728
4	Pajak lainnya ^{a)}	3.211	4.021	4.388	4.643	4.963

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah wajib pajak daerah pada kurun waktu 2017-2021. Dari tabel tersebut terdapat kenaikan jumlah wajib pajak PBB P2, jumlah wajib bayar BPHTB, jumlah wajib pajak PPJ, dan jumlah wajib pajak lainnya. Kenaikan jumlah penerimaan pajak daerah sejalan dengan kenaikan jumlah wajib pajak daerah. Terdapat hubungan yang berbeda khususnya pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Selain hal tersebut, barang milik daerah dapat dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang mana pemakaian kekayaan daerah tertentu di bawah penguasaan pemerintah daerah dikenakan retribusi. Kekayaan daerah tersebut yang selanjutnya disebut obyek retribusi antara lain pemakaian tanah, pemakaian gedung, pemakaian alat berat dan lain-lain pemakaian kekayaan daerah. Kekayaan daerah atau yang disebut dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

1. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan gedung, jalan dan jembatan, jaringan, monumen/bangunan bersejarah.
2. Benda bergerak meliputi mesin, kendaraan, peralatan (alat berat, bengkel, pertanian, kedokteran, laboratorium), hewan ternak dan tanaman, persediaan barang habis pakai, suku cadang serta surat berharga.

Saat ini pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus telah terinventarisir, namun masih ada beberapa barang milik daerah yang belum optimal dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan barang milik daerah

tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dimanfaatkan melalui sewa, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, KSP dan KSPI.

Terkait belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah diantaranya disebabkan karena kurang pedulinya Perangkat Daerah terhadap aset-aset yang berada dalam penguasaannya yang tidak produktif dan kurang aktif dalam mencari informasi tentang aset-aset yang tidak dimanfaatkan. Agar pengelolaan aset menjadi optimal, maka aset tetap yang memenuhi *criteria idle* dan aset tetap yang produktif tetapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh Perangkat Daerah agar dapat dimanfaatkan dengan lebih baik oleh Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah pengelola aset melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Setiap tahun terdapat perubahan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kudus. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan aset jalan, aset irigasi dan jaringan, aset fasum fasos perumahan yang diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dan penambahan aset lainnya. Dari jumlah aset tanah tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa pemanfaatan dari penambahan aset tanah tersebut, ada yang dimanfaatkan sendiri oleh Perangkat Daerah, dimanfaatkan oleh masyarakat atau Pihak Ketiga dan ada aset yang tidak dimanfaatkan. Dengan adanya pemanfaatan, secara otomatis terjadi penurunan aset tanah yang tidak dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Tetap)

Tahun	Jalan (bidang)	Irigasi dan Jaringan (bidang)	Fasum Fasos Perumahan (bidang)	Aset tanah lainnya			Jumlah
				Jumlah	Dimanfaatkan OPD dan Masyarakat	Tidak dimanfaatkan	
2017	567	231	76	390	351	39	1264
2018	567	231	76	391	354	37	1265
2019	567	231	76	396	361	35	1270
2020	581	307	112	342	311	31	1342
2021	912	305	275	382	346	36	1874

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Selain dilakukan pemanfaatan, terhadap barang milik daerah tersebut juga dilakukan pengamanan. Beberapa langkah pengamanan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah pelaksanaan pensertipikatan tanah, pemberian batas tanah, pembuatan pagar keliling dan pemberian papan tanda kepemilikan. Pengamanan perlu dilakukan untuk meminimalisir adanya permasalahan tanah dalam hal ini dihuni oleh masyarakat atau Pihak Ketiga yang tidak berhak dan tanpa dokumen/alas hak yang legal. Kegiatan pengamanan yang saat ini dilaksanakan adalah pelaksanaan pensertifikatan tanah secara menyeluruh. Diharapkan tahun 2023 semua tanah milik Pemerintah Kabupaten Kudus telah bersertipikat. Banyaknya tanah yang belum diajukan pensertipikatan dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Selain hal tersebut terdapat beberapa tanah yang masih belum jelas batas-batas kepemilikannya. Dari kegiatan sertifikasi tanah tersebut, diketahui bahwa masih banyak tanah milik Pemerintah Kabupaten yang belum bersertifikat. Hal ini dapat terlihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Data Aset Tetap Tanah Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bersertifikat (Bidang)	292	292	292	425	1.104
2.	Dalam proses sertifikat (Bidang)	-	-	-	-	-
3.	Belum bersertifikat (Bidang)	912	912	916	917	770
Total		846	1.043	1.204	1.204	1.874

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Berdasarkan hasil pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki 1.874 Bidang Tanah. Dari 1.874 Bidang Tanah tersebut terdiri dari 1.104 tanah telah bersertifikat dan 770 tanah belum bersertifikat. Dari 770 tanah yang belum bersertifikat sebagian besar merupakan tanah yang digunakan untuk fasilitas umum (jalan kabupaten, jalan kelurahan, irigasi, fasilitas umum perumahan). Target pensertipikatan tanah pada tahun 2021 sebanyak 650 bidang dan terealisasi sebanyak 660 bidang. Sedangkan untuk tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kudus merencanakan mengajukan proses pensertifikatan sebanyak 1385 bidang tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja BPPKAD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
Kabupaten Kudus

Kode	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) (Tahun 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d th 2022			
					Tahun lalu (2021) Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi capaian program kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5												
5	08											
5	02	01			82 Indeks	83,00 Indeks	87,84 Indeks	105,83%	83,00 Indeks	90,83 Indeks	109,43%	
5	02	01	2.01		15 Dok	15 Dok	15 Dok	100,00%	15 Dok	8 Dok	93,33%	
5	02	01	2.01	01	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	4 Dok	4 Dok	100,00%	4 Dok	3 Dok	75,00%
					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PD	3 Dok	3 Dok	100,00%	3 Dok	1 Dok	33,33%	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja PD yang tersusun	8 Dok	8 Dok	100,00%	8 Dok	4 Dok	50,00%
5	02	01	2.02		29 Dok	29 Dok	29 Dok	100,00%	29 Dok	4 Dok	50,00%	
5	02	01	2.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	75 ASN	75 ASN	100,00%	75 ASN	75 ASN	100,00%
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima honorarium penanggungjawaban	12 Orang	12 Orang	100,00%	12 Orang	12 Orang	100,00%
5	02	01	2.02	03	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan	29 Dok	29 Dok	100,00%	29 Dok	12 Dok	41,38%
5	02	01	2.03		4 Orang	4 Orang	2 Orang	50,00%	4 Orang	4 Dok	50,00%	
5	02	01	2.03	09	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang	2 Orang	50,00%	4 Orang	-	-
5	02	01	2.06		167 Jenis	167 Jenis	160 Jenis	95,81%	167 Jenis	8 Dok	53,33%	
5	02	01	2.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	15 jenis	100,00%	24 Jenis	8 Dok	33,33%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Bahan/Alat Tulis Kantor	87 Jenis	75 Jenis	86,21%	81 Jenis	35 Jenis	43,21%
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat rumah tangga	35 Jenis	34 Jenis	97,14%	33 Jenis	16 Jenis	48,48%
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah minuman pegawai, makanan dan minuman jamuan tamu	14 Jenis	14 Jenis	100,00%	14 Jenis	7 Jenis	50,00%
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (belanja cetak)	17 Jenis	17 Jenis	100,00%	17 Jenis	5 Jenis	29,41%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4 Jenis	3 Jenis	75,00%	2 Jenis	1 Jenis	50,00%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	157 Orang	65 Orang	41,40%	25 Kali	13 Kali	52,00%
5	02	01	2.07		21 Unit	21 Unit	21 Unit	100,00%	19 Unit	8 Dok	52,63%	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah mebel, perlengkapan dan peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	-
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2 Unit	2 Unit	86,21%	19 Unit	10 Dok	52,63%
5	02	01	2.08		3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	95,81%	3 Jenis	3 Jenis	53,33%	
5	02	01	2.08	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Alat Penyimpanan, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	564 Lembar	500 Lembar	100,00%	5 Jenis	3 Jenis	60,00%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan perengko dan pengiriman surat	3 Rekening	3 Rekening	86,21%	12 bulan	6 bulan	41,67%
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa untuk PHD dan Tenaga Kontrak	13 Orang	13 Orang	97,14%	17 Orang	17 Orang	100,00%

1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		184 Unit	184 Unit	184 Unit	100,00%	184 Unit	50 Unit	53,33%	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			129 Unit	129 Unit	100,00%	129 Unit	40 Unit	31,01%	
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dirawat		15 Unit	15 Unit	15 Unit	100,00%	15 Unit	-	-	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00%	10 Unit	6 Unit	60,00%	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Perengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara		30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	100,00%	30 Jenis	17 Jenis	56,67%	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEMANGAN DAERAH										
						persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		100 persen	100 persen	100 persen	100,00%	100 persen	100 persen	100,00%	
						capaian realisasi pembayaran belanja PD		90 persen	95 persen	82,53 persen	86,87%	95 persen	31,93 persen	33,61%	
						rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		100 persen	100 persen	100 persen	100,00%	100 persen	100 persen	100,00%	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah		8 Dok	8 Dok	7 Dok	87,50%	8 Dok	1 Dok	12,50%	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS			2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	-	-	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS			2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	-	-	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbup APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	-	-	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbup APBD			2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen, SP2D dan laporan pengelolaan perbendaharaan daerah		3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100,00%	12 Dok	3 Dok	25,00%	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi ke pusat/provinsi dan Pengelolaan Kas Daerah			3 Kali	9 Kali	300,00%	3 Kali	1 Kali	33,33%	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen laporan (Dana Transfer) yang terverifikasi			70 Laporan	113 Laporan	161,43%	70 Laporan	66 Laporan	94,29%	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Airlan Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D yang sesuai standar			6954 SP2D	8.136 SP2D	117,00%	6954 SP2D	1567 SP2D	22,53%	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Juklak			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	10 Dok 6 Kali	3 Dok 6 Kali	400%	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		7 Dok	7 Dok	7 Dok	100,00%	7 Dok	1 Dok	14,29%	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen LKPD Kabupaten			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	-	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	-	-	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	-	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	-	-	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan akuntansi Pelaporan Pertanggungjawaban			-	-	-	-	-	-	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, pengelolaan dan penyaliran bantuan keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil Kabupaten		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	0,5 Tahun	50,00%	
5	02	02	2.04	06	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa			1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	0,5 Tahun	50,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Tak Terduga			1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	0,5 Tahun	50,00%	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa			1 Tahun	1 Tahun	100,00%	1 Tahun	0,5 Tahun	50,00%	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90 persen	90 persen	99,79 persen	110,88%	90 persen	99,94 persen	111,04%		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen dokumen pengelolaan barang milik daerah	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100,00%	14 Dok	4 Dok		28,57%	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen SSH, ASB dan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%		3 Dokumen			
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Draft Standar Belanja dan Standar Kebutuhan BMD		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		1 Dokumen			
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		1 Dokumen			
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD									
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Implementasi dan Fasilitas		6 Laporan	6 Laporan	100,00%		34 OPD	34 OPD	100,00%	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD									
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan		587 Sertifikat	660 Sertifikat	112,44%		1425 Sertifikat	671 Sertifikat	47,09%	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Appraisal		1 Paket	1 Paket	100,00%		1 Dok			
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Monev Pengelolaan APBD		4 Kali	4 Kali	100,00%		1 Laporan	1 Laporan	100,00%	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Mengoptimalkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		4 Paket	4 Paket	100,00%					
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat Rekonsiliasi Barang Milik Daerah		4 Kali	4 Kali	100,00%					
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD Semesteran		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%					
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4 Kali	4 Kali	100,00%					
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase realisasi PAD	100 persen	100 persen	106,56 persen	106,56%	100 persen	43,06 persen	43,06%		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah	21 Dok	21 Dok	21 Dok	100,00%		374 Miliar	164,74 Miliar	44,05%	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen kajian Pajak Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		1 Dokumen			
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah WP yang mengikuti sosialisasi kebijakan pajak daerah		4 Kali	4 Kali	100,00%		141 WP	141 WP	100,00%	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		1 Paket	1 Paket	100,00%		1 Paket			
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah Baru		15000 Objek Pajak	15000 Objek Pajak	100,00%		15000 Objek Pajak	5346 Objek Pajak	35,64%	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Peleporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data pajak daerah yang akurat		1 Unit	1 Unit	100,00%		1 Dok			
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Obyek PBB P2 dan BPHTB di Kabupaten Kudus		3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%		16 OP	8 OP	50,00%	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah		300000 Dokumen	391781 Dokumen	130,59%		300000 Dokumen	399406 Dokumen	133,14%	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelaksanaan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		18000 Kali	18000 Kali	100,00%		8000 Frek	5462 Frek	68,28%	
5	02	04	2.01	10	Penefian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Penefian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		5000 Dokumen	5000 Dokumen	100,00%		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	
5	02	04	2.01	11	Pengalihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah		1 Laporan	1 Laporan	100,00%		1	1	100,00%	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		20 Dokumen	30 Dokumen	150,00%		20 Dokumen	52 Dokumen	260,00%	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pelaksanaan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		4 Kali	4 Kali	100,00%		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			3 Kali	3 Kali	100,00%		3 Kali		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus

Analisis kinerja pelayanan BPPKAD memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPPKAD Kabupaten Kudus

No	Indikator	SPM/ Standart	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Nasional		Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2021	Th 2022	Th 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah			82	83	83,5	85	87,84	83,5	85	
2	Persentase realisasi target PAD			100%	100%	100%	100%	106,56%	100%	100%	
3	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan Peraturan Peundang-Undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan belanja daerah sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Capaian realisasi pembayaran belanja OPD			90%	95%	95%	95%	83%	95%	95%	
8	Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah			90%	90%	90%	90%	99,79%	90%	90%	

Tabel. 2.3

Sebagai gambaran perencanaan awal yang tertuang dalam RPJM, seiring dengan dinamika kebutuhan dan mengakomodir kebijakan pemerintah maka BPPKAD melakukan review atas rancangan awal RKPD yang tertuang dalam tabel berikut.

Kode	Unsur / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kegiatan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN									
5	02 KEUANGAN				308.879.462.144				308.879.462.144	
5	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		85 Indeks	20.609.281.735	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		85 Indeks	20.609.281.735	
5	02 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun		15 Dok	19.035.850	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun		15 Dok	19.035.850
5	02 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	9 Dok	10.476.275	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	9 Dok	10.476.275
5	02 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja yang tersusun sesuai standar	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	6 Laporan	8.559.575	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja yang tersusun sesuai standar	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	6 Laporan	8.559.575
5	02 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar		5 Dok	17.273.335.500	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar		5 Dok	19.214.702.500
5	02 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	75 Orang	17.143.873.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	75 Orang	19.085.240.000
5	02 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Dok	125.257.500	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Dok	125.257.500
5	02 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	8 Dok	4.205.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	8 Dok	4.205.000
5	02 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar		1 Dokumen	245.773.650	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar		1 Dokumen	245.773.650
5	02 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	6 Orang	245.773.650	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	6 Orang	245.773.650
5	02 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar		100 Persen	246.934.385	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar		100 Persen	246.934.985
5	02 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	24 Paket	2.520.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	24 Paket	2.517.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	81 Paket	47.155.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81 Paket	47.053.000
5	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	33 Paket	7.970.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Paket	8.072.000
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	14 Paket	28.729.785	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	28.729.785
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	17 Paket	20.682.600	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	20.683.200
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 Dok	4.608.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	4.608.000
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	25 Lap	135.269.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Lap	135.172.000
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBL)		1 Unit	12.700.000	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBL)		1 Unit	19.085.240.000
5	02	01	2,07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Unit	12.700.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12.000.000
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	12 Laporan	603.048.250	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan		12 Laporan	603.048.250
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 Lap	9.090.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	9.090.000
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 Lap	32.747.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	32.747.000
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	12 Lap	561.211.250	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	561.211.250
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar		184 Unit	267.165.000	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar		184 Unit	267.786.500
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	129 Unit	183.079.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129 Unit	183.074.500
5	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	15 Unit	2.879.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	3.505.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	10 Unit	19.601.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	19.601.000	
5	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	30 Unit	61.606.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	61.606.000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian realisasi pembayaran belanja PD Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan belanja daerah sesuai ketentuan Presentase Idesifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.515.410.820	Capaian realisasi pembayaran belanja PD Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan belanja daerah sesuai ketentuan Presentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	284.435.109.820	
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	8 Dok	954.602.340	Jumlah dokumen anggaran daerah		8 Dok	954.602.340	
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang- undangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 Dok	286.901.640	Jumlah Dokumen KUA PPAS tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen KUA PPAS tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang-undangan	2 Dok	286.901.640	
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang- undangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 Dok	157.184.220	Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang- undangan	2 Dok	157.184.220	
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang-undangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 Dok	312.172.640	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang-undangan	2 Dok	312.172.640	
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang- undangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 Dok	198.343.840	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD tersusun sesuai dengan tahapan waktu peraturan perundang- undangan	2 Dok	198.343.840	
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Belanja Perangkat Daerah		12 Dok	230.023.980	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Belanja Perangkat Daerah		12 Dok	230.023.980	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cetak daftar gaji ASN Jumlah koordinasi ke pusat/ke provinsi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	4 Dokumen	98.396.000	Cetak daftar gaji ASN Jumlah koordinasi ke pusat/ke provinsi	Cetak daftar gaji ASN Jumlah koordinasi ke pusat/ke provinsi	4 Dokumen	98.396.000	
5	02	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dana transfer yang terverifikasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	70 Dokumen	44.000.000	Jumlah Laporan dana transfer yang terverifikasi	Jumlah Laporan dana transfer yang terverifikasi	70 Dokumen	44.000.000	
5	02	02	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen SP2D yang sesuai standar	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	6954 Laporan	20.943.000	Jumlah dokumen SP2D yang sesuai standar	Jumlah dokumen SP2D yang sesuai standar	6954 Laporan	20.943.000	
5	02	02	2,02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Perbup, SK, PKS terkait bidang perbendaharaan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	10 Dokumen	66.684.980	Jumlah dokumen Perbup, SK, PKS terkait bidang perbendaharaan	Jumlah dokumen Perbup, SK, PKS terkait bidang perbendaharaan	10 Dokumen	66.684.980	
5	02	02	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD		1 Dok	560.426.500	Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD		1 Dok	560.426.500	
5	02	02	2,03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	18 Laporan	62.670.000	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	62.670.000	
5	02	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Laporan	220.999.500	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	220.999.500	
5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	3 Dokumen	264.325.000	Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	264.325.000	
5	02	02	2,03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Dokumen	5.766.000	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.766.000	
5	02	02	2,03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Dokumen	6.666.000	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	6.666.000	
5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		36 Dok	770.358.000	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		36 Dok	282.690.057.000	
5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	12 Laporan	770.358.000	Jumlah Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	259.819.384.000	
				09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	12 Laporan	-	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 Laporan	4.000.000.000	
				10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	12 Laporan	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		12 Laporan	18.870.673.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah		90 persen	2.063.798.094	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90 persen	2.063.798.094	
5	02	03	2,01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD		12 Dok	2.063.798.094	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	12 Dok	2.063.798.094	
5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen SSH, ASB dan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	3 Dok	105.602.400	Jumlah dokumen SSH, ASB dan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)	Jumlah dokumen SSH, ASB dan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)	3 Dok	105.602.400
5	02	03	2,01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Dok	19.977.900	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok	19.977.900
5	02	03	2,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Dok	4.570.800	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD	1 Dok	4.570.800
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Implementasi dan Fasilitasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	6 Laporan	100.000.294	Implementasi dan Fasilitasi	Implementasi dan Fasilitasi	6 Laporan	100.000.294
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	900 Sertifikat	1.760.360.550	Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan	Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan	900 Sertifikat	1.760.360.550
5	02	03	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Lap	12.706.750	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Lap	12.706.750
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Appraisal	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 Dok	60.579.400	Jumlah Dokumen Appraisal	Jumlah Dokumen Appraisal	2 Dok	60.579.400
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Realisasi PAD		100 Persen	1.771.272.655	Presentase Realisasi PAD	Presentase Realisasi PAD	100 Persen	1.771.272.495	
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD		374 Miliar	Jumlah Realisasi PAD	Jumlah Realisasi PAD	374 Miliar	1.771.272.495	
5	02	04	2,01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 Dok 20 Dok	53.590.260	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dok 20 Dok	25.806.560
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kajian Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Dok	163.105.940	Jumlah Laporan Kajian Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kajian Pajak Daerah	1 Dok	163.105.940
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah titik lokasi sosialisasi pajak	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Laporan	102.573.265	Jumlah titik lokasi sosialisasi pajak	Jumlah titik lokasi sosialisasi pajak	1 Laporan	96.523.265
5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Unit	13.277.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	13.277.600
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah Baru	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	15000 OP/WP	27.460.000	Jumlah Data Pajak Daerah Baru	Jumlah Data Pajak Daerah Baru	15000 OP/WP	27.460.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Laporan	65.000.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	65.000.000	
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek PBB P2 dan BPHTB yang dinilai	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	16 OP	10.442.950	Jumlah Obyek PBB P2 dan BPHTB yang dinilai	Jumlah Obyek PBB P2 dan BPHTB yang dinilai	16 OP	10.442.850	
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	399000 Dok	150.272.000	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	399000 Dok	150272000	
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	22500 Layanan	38.447.000	Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan	Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan	22500 Layanan	38447000	
5	02	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan tahunan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Dok	6.000.000	Jumlah Laporan tahunan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Laporan tahunan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	1 Dok	6.000.000	
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Dok	778.414.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	1 Dok	778.414.000	
5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	60 Dok	4.196.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	60 Dok	4.196.000	
5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Dok	355.589.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dok	355.589.000	
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Laporan	2.804.640	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 Laporan	2.804.640	
5	02	04	2,01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					- Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	33.933.640	

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

OPD : BPPKAD

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Rehabilitasi Jalan Rt 3 Rw 8	1 paket	Dkh Kawaan rt3 rw 8, Kab. Kudus, Dawe, Cendono	BPPKAD	Anggaran : -
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengerasan jalan lingkungan RW 3 Pladen	1 paket	Rw 3 Desa Pladen Kec Jekulo, Kab. Kudus, Jekulo, Pladen	BPPKAD	Anggaran : 175.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan jalan lingkungan RW 9	1 paket	Cendono Rt 1 dan 2 RW 9, Kab. Kudus, Dawe, Cendono	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Penerangan jalan tenaga surya Soco Temadi	1 paket	Desa Soco RW 1, Kab. Kudus, Dawe, Soco	BPPKAD	Anggaran : -
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan Desa Rt 2 Rw 5	1 paket	Dkh Cendono Rt 2 Rw 5, Kab. Kudus, Dawe, Cendono	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan	1 paket	Desa Ploso RW 02, Kab. Kudus, Jati, Ploso	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Makam Mbah Gayur Desa Getas RW 02	1 paket	Desa Getas RW 02, Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Makam Mbah Banteng RT 02 RW 02 Getas	1 paket	Desa Getas RT 02 RW 02, Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan RT 06 RW 01 Ds. Demaan	1 paket	Desa Demaan RT 06 RW 01, Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	BPPKAD	Anggaran : -
10	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembuatan Gorong-gorong RW 07 Desa Demaan	1 paket	Desa Dmaan RW 07, Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	BPPKAD	Anggaran : -
11	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan RW 07 Ds. Demaan	1 paket	Desa Demaan RW 07, Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	BPPKAD	Anggaran : -

1	2	3	4	5	6	7
12	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pembuatan Fasilitas Mandi , Cuci, Kakus RW 04 Ds. Demean	1 paket	Desa Demean RW 04, Kab. Kudus, Kota Kudus, Demean	BPPKAD	Anggaran : -
13	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Renovasi Sekretariat Karang Taruna Ds. Wergu Kulon	1 paket	Desa Wergu Kulon, Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon	BPPKAD	Anggaran : -
14	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu sarpras desa rejosari	1 paket	desa rejosari, Kab. Kudus, Dawe, Rejosari	BPPKAD	Anggaran : 30.000.000
15	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu sarpras desa kuwukan	1 paket	desa kuwukan, Kab. Kudus, Dawe, Kuwukan	BPPKAD	Anggaran : 25.000.000
16	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu sarpras desa soco	1 paket	desa soco, Kab. Kudus, Soco	BPPKAD	Anggaran : 75.000.000
17	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu sarpras desa kajar	1 paket	desa kajar, Kab. Kudus, Dawe, Kajar	BPPKAD	Anggaran : 30.000.000
18	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu sarpras desa puyoh jut	1 paket	desa puyoh, Kab. Kudus, Dawe, Puyoh	BPPKAD	Anggaran : 75.000.000
19	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu saluran desa kandangmas	1 paket	desa kandangmas, Kab. Kudus, Dawe, Kandangmas	BPPKAD	Anggaran : 40.000.000
20	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu sarpras desa cranggung	1 paket	desa, Kab. Kudus, Dawe, Cranggung	BPPKAD	Anggaran : 40.000.000
21	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu sarpras desa kelaling	1 paket	desa kelaling, Kab. Kudus, Jekulo, Klaling	BPPKAD	Anggaran : 75.000.000
22	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu sarpras desa gondoharum	1 paket	desa gondoharum, Kab. Kudus, Jekulo, Gondoharum	BPPKAD	Anggaran : 25.000.000
23	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu sarpras desa	1 paket	desa pladen, Kab. Kudus, Jekulo, Pladen	BPPKAD	Anggaran : 75.000.000
24	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bankeu sarpras desa lau	1 paket	desa lau, Kab. Kudus, Dawe, Lau	BPPKAD	Anggaran : 25.000.000

1	2	3	4	5	6	7
25	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk bantuan keuangan rehab saluran rw 5 rw 3 dan mojoroto samirejo	1 paket	samirejo kudas, Kab. Kudus, Dawe, Samirejo	BPPKAD	Anggaran : 85.000.000
26	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk PEMBANGUNAN POS KAMPLING (POS KEAMANAN LINGKUNGAN) DESA UNDAAN LOR	1 paket	DESA UNDAAN LOR, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
27	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk PEMBANGUNAN POS KAMPLING (POS KEAMANAN LINGKUNGAN) DESA WATES	1 paket	DESA WATES, Kab. Kudus, Undaan, Wates	BPPKAD	Anggaran : -
28	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Drainase / Saluran Air Kampung Gang 27	1 paket	Undaan Lor Gang 27, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Lor	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
29	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Drainase Gang 23 Undaan Lor	1 paket	Undaan Lor, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Lor	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
30	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran/Drainase Jl. Winong - Pepringan RW07 - RW08 Dk.Proko Winong	1 paket	Jl. Winong - Pepringan RW07 - RW08 Dk.Proko Winong, Kab. Kudus, Kaliwungu, Kaliwungu	BPPKAD	Anggaran : -
31	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan (JUT) Blok Jangkrik Wetan	1 paket	Desa Mejobo, Kab. Kudus, Mejobo, Mejobo	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
32	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jembatan Gedangan Kancilan	1 paket	Desa Terban, Kab. Kudus, Jekulo, Terban	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
33	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran air di RW 02	1 paket	Desa Hadi polo, Kab. Kudus, Jekulo, Hadi polo	BPPKAD	Anggaran : -
34	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Penahan tanah di RW 04	1 paket	Dosa Golantepus, Kab. Kudus, Mejobo, Golantepus	BPPKAD	Anggaran : -
35	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran RW 07	1 paket	Desa Tumpang Krasak, Kab. Kudus, Jati, Tumpangkrasak	BPPKAD	Anggaran : -
36	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Badan Jalan di RW 02 Desa Hadi polo	1 paket	Desa Hadi polo Kecamatan Jekulo, Kab. Kudus, Jekulo, Hadi polo	BPPKAD	Anggaran : -
37	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Penahan Tanah di RW. 06 Desa Golan Tepus	1 paket	Desa Golan Tepus Kecamatan Mejobo, Kab. Kudus, Mejobo, Golantepus	BPPKAD	Anggaran : -

1	2	3	4	5	6	7
38	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Betonisasi JUT Blok Sendang Ngampon Hadi polo	1 paket	Ngampon Hadi polo RT 08 RW 4, Kab. Kudus, Jekulo, Hadi polo	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
39	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk PAMSIMAS (pembangunan sitem penyediaan air minum masyarakat di rw 04) di wilayah rw 04 desa jetiskapuan belum terlayani	1 paket	rw 04 desa jetiskapuan, Kab. Kudus, Jati, Jetiskapuan	BPPKAD	Anggaran : -
40	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan jalan di wilayah rt 02 rw 02 dan rt 03 rw 03 belum ada drainase yang memadai	1 paket	rt 02 rw 02 dan rt 03 rw 03 desa jetiskapuan, Kab. Kudus, Jati, Jetiskapuan	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
41	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembuatan lapangan yang tidak bisa di gunakan sepak bola/ olah raga masyarakat karena rusak	1 paket	desa jetiskapuan, Kab. Kudus, Jati, Jetiskapuan	BPPKAD	Anggaran : 500.000.000
42	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan di wilayah RW 04 Desa Jetiskapuan yang perlu pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum / LPJU (Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum di RW 04 Desa Jetiskapuan	1 paket	RW 04 Desa Jetiskapuan, Kab. Kudus, Jetiskapuan	BPPKAD	Anggaran : -
43	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Drainase dan tutup saluran RT.04 RW.06 Desa Tumpangkrasak	1 paket	Desa Tumpangkrasak RT.04 RW.06, Kab. Kudus, Jati, Tumpangkrasak	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
44	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Pengaspalan Jalan RW.02 Desa Megawon	1 paket	RW 2 Desa Megawon, Kab. Kudus, Jati, Megawon	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
45	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengecoran JUT Blok Tahunan Blok Sunten Desa Loram Wetan	1 paket	Blok Tahunan Blok Sunten Desa Loram Wetan, Kab. Kudus, Jati, Loram Wetan	BPPKAD	Anggaran : -
46	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan Kelapa Gading I Megawon RT.02/4 Jati Kudus	1 paket	Megawon RT.02/4 Jati Kudus, Kab. Kudus, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
47	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Program Betonisasi Jalan menuju Dukuh Lundryk Tapakan Desa Menawan P : 500 L : 3 T : 0,15 V : 225 M3 di butuhkan karena rusak. jalan masih dalam bentuk tanah	1 paket	Lundryk Tapakan, Kab. Kudus, Gebog, Menawan	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
48	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dukuh Tumpuk s.d Dukuh Krajan. Hal ini di karenakan jalan berkelok dan berbahaya pada saat gelap/ malam.	1 paket	Rahtawu, Kab. Kudus, Gebog, Rahtawu	BPPKAD	Anggaran : -
49	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Program Bantuan Pembangunan Lapangan Desa Gondosari. Dasarnya bahwa banyaknya pemuda atau warga yang menggunakan fasilitas kegiatan berolahraga dan belum bisa di akses karena keadaan lapangan yang belum memungkinkan untuk berolahraga.	1 paket	RT 1 RW 2, Kab. Kudus, Gebog, Gondosari	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000

1	2	3	4	5	6	7
50	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Taman Desa Rahtawu. Infrastruktur penunjang desa wisata, sehingga di pertukan Pembangunan Taman Desa Rahtawu. secara Rahtawu merupakan desa wisata yang sedang di kembangkan	1 paket	RW 1, Kab. Kudus, Gebog, Rahtawu	BPPKAD	Anggaran : -
51	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Perbaikan Lapangan sepak bola dan jogging track di Buper Menawan dengan L: 72 P:47 di butuhkan untuk aktivitas dan kegiatan masyarakat	1 paket	Desa Menawan, Kab. Kudus, Gebog, Menawan	BPPKAD	Anggaran : -
52	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan lapangan desa Klumpit di butuhkan untuk aktivitas dan kegiatan masyarakat	1 paket	Desa Klumpit, Kab. Kudus, Gebog, Klumpit	BPPKAD	Anggaran : -
53	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jogging Track luas 600 m2 di desa Getassrabi RT 06 RW 01 karena tempat masyarakat untuk berkegiatan olahraga masih sangat minim. sehingga salah satunya di butuhkan pembuatan jogging track	1 paket	RT 6 RW 1, Kab. Kudus, Gebog, Getassrabi	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran air/Drainase RW08 dan RW09 Desa Pasuruhan Lor	1 paket	RW08 dan RW09, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
55	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran/Drainase Gang 7 Ds. Tanjung Karang	1 paket	Gang 7 Tanjung Karang, Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	BPPKAD	Anggaran : -
56	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran/Drainase Jl. Makam Desa Ploso	1 paket	Jl. Makam Ploso, Kab. Kudus, Ploso	BPPKAD	Anggaran : -
57	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran/Drainase Desa Megawon RW01	1 paket	Desa Megawon RW01, Kab. Kudus, Jati, Megawon	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
58	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran/Drainase Kelurahan Mlati Norowito RT01/RW08 Gang 10	1 paket	Gang 10 RT01/RW08, Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
59	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran/Drainase Desa Pasuruhan kidul RW01	1 paket	Desa Pasuruhan Kidul RW01, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Kidul	BPPKAD	Anggaran : -
60	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Rehabilitasi saluran/Drainase Desa Mlati Lor RW02	1 paket	Desa Mlati Lor Gang aman RW02, Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor	BPPKAD	Anggaran : -
61	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan desa Pasuruhan Kidul RW03/RW04	1 paket	Desa Pasuruhan Kidul RW03/RW04, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Kidul	BPPKAD	Anggaran : -
62	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Rabat Beton Jaln Pesantren Barat desa Tumpangkrasak RT01/RW07	1 paket	Desa Tumpangkrasak RT01/RW07, Kab. Kudus, Jati, Tumpangkrasak	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000

1	2	3	4	5	6	7
63	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan Paving RT. 01, 03, dan 04, RW.02 Janggalan	1 paket	Desa Janggalan RT. 01, 03, dan 04, RW.02, Kab. Kudus, Kota Kudus, Janggalan	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
64	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Paving dk. Barisan	1 paket	Dk. Barisan, Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	BPPKAD	Anggaran : -
65	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Pandawa I desa Tumpangkrasak	1 paket	JL. Pandawa 1 Desa Tumpangkrasak, Kab. Kudus, Jati, Tumpangkrasak	BPPKAD	Anggaran : -
66	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan RW.01 Ds. Pasuruan Kidul	1 paket	Jalan RW.01 Ds. Pasuruan Kidul, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Kidul	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
67	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan Paving RT 01,03,04 RW.02 Desa Janggalan	1 paket	RT 01,03,04 RW.02 Desa Janggalan, Kab. Kudus, Kota Kudus, Janggalan	BPPKAD	Anggaran : -
68	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan jalan beton rw 3 dan rw 4 desa Jetis Kapuan	1 paket	rw 3 dan rw 4 desa Jetis Kapuan, Kab. Kudus, Jati, Jetiskapuan	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
69	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan Beton RW.03 dan 04 Jetiskapuan Kec. Jati	1 paket	RW.03 dan 04 Jetiskapuan, Kab. Kudus, Jati, Jetiskapuan	BPPKAD	Anggaran : -
70	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Singocandi RT.08 RW.1 Kec. Kota	1 paket	Singocandi RT.08 RW.1, Kab. Kudus, Kota Kudus, Singocandi	BPPKAD	Anggaran : -
71	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Mbereman Dk. Tanjung Kali Desa Tanjung Karang RT05/RW05	1 paket	Dk. Tanjung Kali Desa Tanjung Karang RT05/RW05, Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	BPPKAD	Anggaran : -
72	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam MBAH DEMANG Tanjungkarang	1 paket	Tanjungkarang Gang 7, Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
73	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Ploso	1 paket	Makam Desa Ploso, Kab. Kudus, Jati, Ploso	BPPKAD	Anggaran : -
74	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan pagar makam singocandi RT. 08 RW. 01 Panjang = 140 m" Tinggi = 2,50 m" Jumlah = 350 m2	1 paket	singocandi RT. 08 RW. 01, Kab. Kudus, Kota Kudus, Singocandi	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
75	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Barisan	1 paket	Dk. Barisa Desa Jati Wetan, Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	BPPKAD	Anggaran : -

1	2	3	4	5	6	7
76	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Tumpangkrasak	1 paket	Desa Tumpangkrasak, Kab. Kudus, Jati, Tumpangkrasak	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
77	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Gapura Tumpangkrasak	1 paket	Desa Tumpangkrasak, Kab. Kudus, Jati, Tumpangkrasak	BPPKAD	Anggaran : -
78	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Gapura Desa Pasuruan Kidul	1 paket	Desa Pasuruan Kidul, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Kidul	BPPKAD	Anggaran : -
79	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Lapak PKL	1 paket	Desa Tumpangkrasak, Kab. Kudus, Jati, Tumpangkrasak	BPPKAD	Anggaran : -
80	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Lapangan Bola Voley Desa Bae RT.4 RW.5	1 paket	Bae RT.4 RW.5, Kab. Kudus, Bae, Bae	BPPKAD	Anggaran : -
81	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Peninggian Lapangan Sepak Bola desa Hadi wamo	1 paket	desa Hadi wamo, Kab. Kudus, Mejobo, Hadi wamo	BPPKAD	Anggaran : -
82	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Penataan Lapangan Desa Pedawang	1 paket	Desa Pedawang, Kab. Kudus, Bae, Pedawang	BPPKAD	Anggaran : -
83	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Penataan Pembangunan Lapangan Desa Burikan	1 paket	Desa Burikan, Kab. Kudus, Kota Kudus, Burikan	BPPKAD	Anggaran : -
84	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Penataan Lapangan Desa Garung Lor	1 paket	Desa Garung Lor, Kab. Kudus, Kaliwungu, Garung Lor	BPPKAD	Anggaran : -
85	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Penataan Lapangan Bola Loram Kulon	1 paket	Loram Kulon, Kab. Kudus, Jati, Loram Kulon	BPPKAD	Anggaran : -
86	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Gedung Olahraga Ngembal Kulon	1 paket	Ngembal Kulon, Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon	BPPKAD	Anggaran : -
87	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan pasar desa jati kulon	1 paket	Desa Jati Kulon, Kab. Kudus, Jati, Jati Kulon	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
88	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan RW.05 dan RW.06 Desa Jati Kulon	1 paket	RW.05,06 Desa Jati Kulon, Kab. Kudus, Jati, Jati Kulon	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000

1	2	3	4	5	6	7
89	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Betonisasi Jalan RW.04 Desa Jati Kulon	1 paket	RW.04 Desa Jati Kulon, Kab. Kudus, Jati, Jati Kulon	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
90	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembanunan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.04 RW.03 Desa Jati Kulon	1 paket	RT.04 RW.03, Kab. Kudus, Jati, Jati Kulon	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
91	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Lapangan Sepakbola Samba Desa Jati Kulon	1 paket	lapangan Samba Desa Jati Kulon, Kab. Kudus, Jati, Jati Kulon	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
92	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Perbaikan Kondisi Sarpras Desa perlu perbaikan	1 paket	Jalan di wilayah RT.05 RW.02 Desa Jati Kulon, Kab. Kudus, Jati, Jati Kulon	BPPKAD	Anggaran : -
93	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Peninggian beton jalan yg perlu di tinggikan	1 paket	Gg Gendok RT 2 - 6 RW 3, Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	BPPKAD	Anggaran : 250.000.000
94	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk peningkatan perlunya sarana futsal/ olah raga	1 paket	RT 05 RW 01, Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
95	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Keperluan rehabilitasi lapangan sepak bola	1 paket	Jati Wetan (belakang Balai desa), Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
96	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk keperluan perbaikan jalan desa	1 paket	Rt 03 RW 02 Jati Wetan (sebelah masjid), Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
97	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Peningkatan Prasarana Olahraga	1 paket	pasuruan Lor, Kab. Kudus, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
98	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Keperluan bantuan prasarana tim bola voly untuk pembinaan	1 paket	Pasuruan Kidul, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Kidul	BPPKAD	Anggaran : -
99	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Ds. Kesambi	1 paket	Desa Kesambi, Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi	BPPKAD	Anggaran : -
100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Bansus Pada pembangunan Desa Getasserabi	1 paket	Desa Getassrabi, Kab. Kudus, Gebog, Getassrabi	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
101	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Hibah Bansus pada pembnagunan di Desa Jurang	1 paket	Desa Jurang, Kab. Kudus, Gebog, Jurang	BPPKAD	Anggaran : 350.000.000

1	2	3	4	5	6	7
102	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Hibah Bansus pada pembangunan di Desa Kedungsari	1 paket	Desa Kedungsari, Kab. Kudus, Gebog, Kedungsari	BPPKAD	Anggaran : 350.000.000
103	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pavingisasi RW 02 desa Setrokalangan	1 paket	Desa Setrokalangan, Kab. Kudus, Kaliwungu, Setrokalangan	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
104	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan RW 02 Desa Garung lor	1 paket	Desa Garung Lor RW 02, Kab. Kudus, Kaliwungu, Garung Lor	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
105	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan RW 01 Desa Garung Lor	1 paket	Desa Garung Lor RW 01, Kab. Kudus, Kaliwungu, Garung Lor	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
106	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan RW 04 Desa Papingan	1 paket	Desa Papingan, Kab. Kudus, Kaliwungu, Kaliwungu, Seluruh Kelurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
107	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan RW 08 Desa Besito	1 paket	Desa Besito, Kab. Kudus, Gebog, Besito	BPPKAD	Anggaran : -
108	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan Desa ke Makam	1 paket	Desa Klumpit Dukuh Kalijopo RT 01 RW 04 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Kab. Kudus, Gebog, Klumpit	BPPKAD	Anggaran : -
109	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman	1 paket	Desa Gondosari Dukuh Ngenplek Wetan RT 04 RW 08 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Kab. Kudus, Gebog, Gondosari	BPPKAD	Anggaran : -
110	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Saluran Irigasi RW 03	1 paket	Prambatan Lor RT 02 RW 03, Kab. Kudus, Kaliwungu, Prambatan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
111	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan Desa di RW 01	1 paket	Prambatan Lor RW 01, Kab. Kudus, Prambatan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
112	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Ngasem	1 paket	Prambatan Lor RT 07 RW 03, Kab. Kudus, Kaliwungu, Prambatan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
113	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan Beton Desa Getas Rabi	1 paket	Jalan Sraji Lor - Jatis Desa Getasrabi, Kab. Kudus, Gebog, Getasrabi	BPPKAD	Anggaran : -

1	2	3	4	5	6	7
114	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembuatan LPJU Dukuh Klecan RT 05 RW 03	1 paket	Prambatan Kidul RT 05 RW 03, Kab. Kudus, Kaliwungu, Prambatan Kidul	BPPKAD	Anggaran : -
115	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan Desa Panjang RT.01.02 RW.01	1 paket	RT.01.02 RW.01 Desa Panjang, Kab. Kudus, Bae, Panjang	BPPKAD	Anggaran : 117.000.000
116	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Drainase Jalan RT.01.02 Rw.01 Desa Panjang	1 paket	Jalan RT.01.02 Rw.01 Desa Panjang, Kab. Kudus, Bae, Panjang	BPPKAD	Anggaran : 133.000.000
117	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jembatan Bantu dari RW.02-RW.03	1 paket	RW.02, 03, Kab. Kudus, Bae, Panjang	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
118	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Sederan Makam Barat Sungai Desa Panjang RT.04 Rw.03	1 paket	RT.04 RW.03 Desa Panjang, Kab. Kudus, Bae, Panjang	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
119	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Sederan Makam Timur sungai desa Panjang RT04 RW02	1 paket	RT04/RW02, Kab. Kudus, Bae, Panjang	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
120	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan IPAL Komunal di lingkungan RT.06 RW.01 Desa Hadi polo	1 paket	RT.06 RW.01 Desa Hadi polo, Kab. Kudus, Jekulo, Hadi polo	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
121	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Dosa untuk Pembangunan Jalan Lingkungan RT.05 RW.01 Desa Hadi polo	1 paket	RT.05 RW.01 Desa Hadi polo, Kab. Kudus, Jekulo, Hadi polo	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
122	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan RT.06 RW.01	1 paket	RT.06 RW.01, Kab. Kudus, Jekulo, Hadi polo	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
123	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk PEMBANGUNAN GORONG-GORONG RT.05 RW.02 DESA MEGAWON	1 paket	RT.05 RW.02 DESA MEGAWON, Kab. Kudus, Jati, Megawon	BPPKAD	Anggaran : -
124	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan Menuju Madrasah Tahfidh Tasywiq Al Qur'an sepanjang 300 meter	1 paket	Desa Garung Lor RT. 07/ RW. 02, Kab. Kudus, Kaliwungu, Garung Lor	BPPKAD	Anggaran : -
125	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengecoran Jalan Gang X RT. 11/ RW. 02 Desa Garung Lor	1 paket	Jalan Desa Garung Lor Gang X RT. 11/ RW. 02, Kab. Kudus, Kaliwungu, Garung Lor	BPPKAD	Anggaran : -
126	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Kaliwungu - Dukuh Winong	1 paket	Dukuh Winong RW. 07, Kab. Kudus, Kaliwungu, Kaliwungu	BPPKAD	Anggaran : -

1	2	3	4	5	6	7
127	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran Drainase Dk. Winong - Padurenan	1 paket	Dukuh Winong RW. 06, Kab. Kudus, Kaliwungu, Kaliwungu	BPPKAD	Anggaran : -
128	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran Drainase Dukuh Kacu Rejo Sopanjang 300 meter	1 paket	Dukuh Kacu Rejo RT. 07/ RW. 04, Kab. Kudus, Kaliwungu, Banget	BPPKAD	Anggaran : -
129	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Rehab Pengaspalan Jalan Ruas Kaliwungu - Dk. Winong	1 paket	Dukuh Winong - Kaliwungu, Kab. Kudus, Kaliwungu, Kaliwungu	BPPKAD	Anggaran : -
130	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran air/Drainase Jl. Pioso - Pasuruan Kidul (Sebelah selatan balai desa Pasuruan Lor) Panjang 300 m lebar 0,5 m dan tinggi 0,7 m	1 paket	Pasuruan Lor (Sebelah selatan Balai desa Pasuruan Lor), Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
131	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jembatan Jl. Ganesha - Pasuruan Lor Panjang 9 m dan Lebar 5 m	1 paket	Jl. Ganesha - Pasuruan Lor, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
132	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran air Jl. Ganesha - Pasuruan Lor Panjang 292 m lebar 0,5 m dan tinggi 0,7 m	1 paket	Jl. Ganesha - Pasuruan Lor, Kab. Kudus, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
133	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran air/drainase Jl.Ganesha - Pasuruan Lor RW07 Panjang 300 m Lebar 0,5 m dan tinggi 0,5 m	1 paket	Jl. Ganesha - Pasuruan Lor RW07, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
134	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran air/Drainase Jl.Ganesha - Pasuruan Lor RT02/RW10 Panjang 250 m Lebar 0,4 m dan tinggi 0,5 m	1 paket	Jl.Ganesha- Pasuruan Lor RT02/RW10, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
135	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran air/drainase Jl.Pasuruan Lor - Pasuruan Kidul RW10 Panjang 285 Lebar 0,5 m dan tinggi 0,6 m	1 paket	Jl. Pasuruan Lor - Pasuruan Kidul RW10, Kab. Kudus, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
136	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran air/Drainase Jl. Ganesha - Pasuruan Lor Panjang 150 m lebar 0,5 m dan tinggi 0,6 m	1 paket	Jl. Ganesha - Pasuruan Lor, Kab. Kudus, Jati, Jati, Seluruh Kelurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
137	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Betonisasi Jalan RW 04 Desa Kajar Kec.Dawe	1 paket	Desa Kajar RW 04 kec. Dawe, Kab. Kudus, Dawe, Kajar	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
138	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan RW 01 Dukuh Tempel Ds.Kandangmas Dawe	1 paket	Dukuh Tempel RW 01 Desa Kandangmas, Kab. Kudus, Dawe, Kandangmas	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
139	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan RW 03 Desa Japan	1 paket	Desa Japan RW 03 Dawe, Kab. Kudus, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000

1	2	3	4	5	6	7
140	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Taliut Jalan RW 05 Ds.Japan Dawe	1 paket	Desa Japan RW 05 Kecamatan Dawe, Kab. Kudus, Dawe, Japan	BPPKAD	Anggaran : -
141	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan RW 07 Desa Margorejo	1 paket	Desa Margorejo RW 07, Kab. Kudus, Dawe, Margorejo	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
142	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan RW 06 Desa Margorejo	1 paket	Desa Margorejo RW 06, Kab. Kudus, Dawe, Margorejo	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
143	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan RW 05 Desa Lau	1 paket	Desa Lau RW 05, Kab. Kudus, Dawe, Lau	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
144	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan RW 02 Desa Lau	1 paket	Desa Lau RW 02, Kab. Kudus, Dawe, Lau	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
145	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan RW 02 Desa Sadang	1 paket	Desa Sadang RW 02, Kab. Kudus, Jekulo, Sadang	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
146	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembuatan Saluran Air Dukuh Krajan RW 03	1 paket	Dukuh Krajan RW 03 Desa Pladen, Kab. Kudus, Jekulo, Pladen	BPPKAD	Anggaran : -
147	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembuatan Jembatan RW 03 Desa Sidomulyo	1 paket	Desa Sidomulyo RW 03 Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Jekulo, Sidomulyo	BPPKAD	Anggaran : -
148	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan RT 02 RW 08 Desa Kandangmas	1 paket	Kandangmas RT 02/08 Kec. Dawe, Kab. Kudus, Dawe, Kandangmas	BPPKAD	Anggaran : -
149	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembuatan Senderan Jalan RW 07 Kandangmas	1 paket	Desa Kandangmas RW 07, Kab. Kudus, Dawe, Kandangmas	BPPKAD	Anggaran : -
150	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Jalan rusak, yang memerlukan adanya pembangunan betonisasi jalan penghubung antar dukuh	1 paket	Gondoarum RW. 3 - RW. 5, Kab. Kudus, Jekulo, Gondoarum	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
151	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Jl. Babalan di Kutuk belum ada talud, mengakibatkan penyempitan badan jalan karena lonsor	1 paket	Jl. Babalan - Kutuk, Desa Larikrejo, Kab. Kudus, Undaan, Larikrejo	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
152	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Jl. Medini di Desa Kutuk yang belum ada talud, mengakibatkan penyempitan badan jalan karena lonsor	1 paket	Jl. Medini - Kutuk, Kab. Kudus, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000

1	2	3	4	5	6	7
153	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Jl. Undaan Tengah - Batas Pati belum ada talud, mengakibatkan penyempitan badan jalan karena lon sor	1 paket	Jl. Undaan Tengah - Batas Pati, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
154	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Jalan Blok Setro Mulyo menjadi sempit karena sering longsor, maka perlu di bangun di ndi ng penahan jalan.	1 paket	Jalan Blok Setro Mulyo, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
155	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Jalan Blok Larik Joyo belum ada talud, mengakibatkan penyempitan badan jalan karena lon sor	1 paket	Jalan Blok Larik Joyo, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
156	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Jalan Blok Balong Rejo belum ada taludnya, mengakibatkan penyempitan badan jalan karena lon sor.	1 paket	Jalan Blok Balong Rejo, Kab. Kudus, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
157	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Jalan Blok Guntur belum ada talud, mengakibatkan penyempitan badan jalan karena lon sor	1 paket	Jalan Blok Guntur, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
158	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan dinding Penahan Jalan Blok Pusoko belum ada, mengakibatkan penyempitan badan jalan karena lon sor	1 paket	Jalan Blok Pusoko, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
159	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan dinding Penahan Jalan Blok Pomahan belum ada, mengakibatkan penyempitan badan jalan karena lon sor.	1 paket	Jalan Blok Pomahan, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
160	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan dinding Penahan Jalan Blok Ngapani belum ada. mengakibatkan penyempitan badan jalan karena lon sor	1 paket	Jalan Blok Ngapani, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
161	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Rabat Beton Jalan Blok Larik Joyo perlu di bangun, karena Jalan rusak sehingga transportasi pertanian terhambat.	1 paket	Blok Larik Joyo, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
162	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengurukan Jalan Blok Pusoko harus di lakukan, karena kondisi si di daerah cekungan dan tergenang air, akibatnya transportasi pertanian terganggu.	1 paket	Jalan Blok Pusoko, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
163	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan di Jalan Blok Ngapani yang perlu di lakukan pengurukan, karena di cekungan dan tergenang air, sehingga transportasi pertanian terhambat, karena jalan rusak	1 paket	Jalan Blok Ngapani, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 400.000.000
164	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Blok Larik Aman perlu di lakukan, karena Jalan rusak sehingga transportasi pertanian terhambat.	1 paket	Jalan Blok Larik Aman, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 500.000.000
165	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Rabat Beton Jalan Blok Pusoko perlu di lakukan, karena Jalan rusak sehingga transportasi pertanian terhambat.	1 paket	Jalan Blok Pusoko, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah	BPPKAD	Anggaran : 500.000.000

1	2	3	4	5	6	7
166	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembuatan Jalan rusak belum pernah di aspal, maka perlu di bangun betonisasi	1 paket	Desa Bulung Kulon Dukuh Tengah RT. 003 RW. 005, Kab. Kudus, Jekulo, Bulung Kulon	BPPKAD	Anggaran : -
167	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Bahu Jalan Longsor, perlu adanya pembangunan Talut Jalan Ruas Jalan Bulung Kulon - Jawik Pladen	1 paket	Jalan Bulung Kulon, Kab. Kudus, Jekulo, Bulung Kulon	BPPKAD	Anggaran : -
168	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Jalan rusak belum pernah di aspal, perlu adanya betonisasi	1 paket	Dukuh Tengah Wetan RT. 002, 005 / RW. 008, Kab. Kudus, Jekulo, Bulung Kulon	BPPKAD	Anggaran : -
169	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk betonisasi Jalan	1 paket	Dukuh Tengah Kulon RT. 006 / RW. 003, Kab. Kudus, Jekulo, Bulung Kulon	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
170	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Ruas Jalan Kabupaten Desa Bulung Kulon - Jawik Pladen Rusak	1 paket	Desa Bulungkulon - Jawik Pladen, Kab. Kudus, Jekulo, Bulung Kulon	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
171	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan dinding penahan pada jalan agar tidak tongsor	1 paket	Jalan Lingkungan RW 01, Kab. Kudus, Undaan, Glagahwaru	BPPKAD	Anggaran : -
172	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk perbaikan saluran air karena Penyumbatan yang mengakibatkan genangan	1 paket	RW 04 - RW 05, Kab. Kudus, Undaan, Glagahwaru	BPPKAD	Anggaran : -
173	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan sarpras di Desa Undaan yang Belum mempunyai Gedung Serbaguna	1 paket	RT 05 RW 01, Kab. Kudus, Undaan, Kutuk	BPPKAD	Anggaran : -
174	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Sebagai lanjutan pembuatan Drainase Jalan Benthung Desa	1 paket	Jalan Benthung Desa RW 01 - RW 02, Kab. Kudus, Undaan, Kutuk	BPPKAD	Anggaran : -
175	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan sarprasUntuk pencegahan longsor	1 paket	Jalan Desa Kutuk, Kab. Kudus, Undaan, Kutuk	BPPKAD	Anggaran : -
176	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk perbaikan jembatan di Lingkungan RT 01 RW 01 yang memperhatikan	1 paket	RT 01 RW 01, Kab. Kudus, Undaan, Kutuk	BPPKAD	Anggaran : -
177	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk perbaikan jalan di lingkungan RT 01 RW 01 yang kurang memadai	1 paket	RT 01 RW 01, Kab. Kudus, Undaan, Kutuk	BPPKAD	Anggaran : -
178	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk perbaikan Benthung Desa di RW 05 yang kurang memadai	1 paket	RW 05, Kab. Kudus, Undaan, Kutuk	BPPKAD	Anggaran : -

1	2	3	4	5	6	7
179	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran pembuangan air di lingkungan RT 01 RW 04 karena sebelumnya Kurang lancarnya	1 paket	RT 01 RW 04, Kab. Kudus, Undaan, Kutuk	BPPKAD	Anggaran : -
180	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembuangan karena kurang air lingkungan RT 10 RW 03	1 paket	RT 10 RW 03, Kab. Kudus, Undaan, Kutuk	BPPKAD	Anggaran : -
181	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan dinding sebagai penahan pada jalan agar tidak longsor	1 paket	Jalan lingkungan RW 01, Kab. Kudus, Undaan, Glagahwaru	BPPKAD	Anggaran : -
182	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk keperluan pembuatan Drainase untuk mengurangi penyumbatan aliran air yang mengakibatkan genangan	1 paket	RW 04 - RW 05, Kab. Kudus, Undaan, Glagahwaru	BPPKAD	Anggaran : -
183	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Gedung Serbaguna dan sangat mendesak	1 paket	KUTUK, Kab. Kudus, Undaan, Kutuk	BPPKAD	Anggaran : -
184	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Sebagai lanjutan pembuatan drainase Jalan Benthung Desa	1 paket	Jalan Benthung Desa, RW 01 - RW 02, Kab. Kudus, Undaan, Kutuk	BPPKAD	Anggaran : -
185	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan pelebaran jalan ngemplak karangrowo	1 paket	desa ngemplak, Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo	BPPKAD	Anggaran : -
186	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Peninggian jalan karangrowo larik rejo	1 paket	karangrowo larikrejo, Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo	BPPKAD	Anggaran : -
187	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Bantuan Keuangan di Desa Karangrowo	1 paket	Desa Karangrowo, Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo	BPPKAD	Anggaran : 500.000.000
188	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Bantuan keuangan Desa Payaman	1 paket	Desa Payaman, Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan	BPPKAD	Anggaran : -
189	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pompa tenaga surya Desa Karangrowo	1 paket	Desa Wates, Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo	BPPKAD	Anggaran : -
190	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Bantuan Keuangan Desa Ngemplak	1 paket	Desa Ngemplak, Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak	BPPKAD	Anggaran : 500.000.000
191	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Bantuan keuangan Desa Larikrejo	1 paket	Desa Larikrejo, Kab. Kudus, Undaan, Larikrejo	BPPKAD	Anggaran : 500.000.000

1	2	3	4	5	6	7
192	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Bantuan Keuangan Desa Sambung	1 paket	Desa Sambung, Kab. Kudus, Sambung	BPPKAD	Anggaran : -
193	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Bantuan Keuangan Desa Gulang	1 paket	Desa Gulang, Kab. Kudus, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : -
194	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Pembangunan Pompa Tenaga Surya Desa Karangrowo	1 paket	Desa Karangrowo, Kab. Kudus, Karangrowo	BPPKAD	Anggaran : -
195	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Betonisasi jalan srahi lor jetis rw2	1 paket	Getasrabi RW 2, Kab. Kudus, Gebog, Getassrabi	BPPKAD	Anggaran : -
196	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Betonisasi jalan (Lanjutan) Prambatan Lor - Purwosari	1 paket	Dk. Salak Ds. Padurenan, Kab. Kudus, Gebog, Padurenan	BPPKAD	Anggaran : -
197	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi jalan (Lanjutan) Prambatan Lor - Purwosari	1 paket	Prambatan Lor, RT.08 RW. 3, Kab. Kudus, Kaliwungu, Prambatan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
198	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan jalan RT 02, 05 RW 04.	1 paket	Prambatan Kidul RW 04, Kab. Kudus, Kaliwungu, Prambatan Kidul	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
199	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Karangasem	1 paket	RI 01/Rw 05, Dukuh Kyongan, Desa Karangampel, Kab. Kudus, Kaliwungu, Karangampel	BPPKAD	Anggaran : -
200	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Permohonan Pembangunan Jalan Lingkungan	1 paket	RW 05 Dukuh Kalidoro, Kab. Kudus, Jekulo, Bulungcangkring	BPPKAD	Anggaran : -
201	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Permohonan Pembangunan Jalan Lingkungan	1 paket	RW 15 Dukuh Karangrowo, Kab. Kudus, Jekulo, Bulungcangkring	BPPKAD	Anggaran : -
202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Permohonan Pembangunan Jalan Lingkungan	1 paket	RW, 2 Dukuh Pecinan, Kab. Kudus, Jekulo, Bulungcangkring	BPPKAD	Anggaran : -
203	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Pembangunan lapangan, Kondisi Lapangan Kurang layak	1 paket	Lapangan Olah Raga Desa Bulungcangkring, Kab. Kudus, Jekulo, Bulungcangkring	BPPKAD	Anggaran : 300.000.000
204	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Makam Guyangan Dukuh Karang Desa Jekulo	1 paket	Dukuh Karang, Kab. Kudus, Jekulo, Jekulo	BPPKAD	Anggaran : -

1	2	3	4	5	6	7
205	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan Lingkungan Dukuh Mijen Rw. 10, 11. & 12	1 paket	Dukuh Mijen RW. 10, 11, & 12, Kab. Kudus, Jekulo, Bulungcangkring	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
206	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran Air Jalan Lingkungan Rw. 8 dan Rw. 9 Desa Bulungcangkring	1 paket	Desa Bulungcangkring Rw. 8 & Rw. 9, Kab. Kudus, Jekulo, Bulungcangkring	BPPKAD	Anggaran : -
207	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Pemotongan Betonisasi Jalan Gang RL 02 Rw. 01 Desa Menawan	1 paket	Gang Rt. 02 Rw. 01 Desa Menawan, Kab. Kudus, Gebog, Menawan	BPPKAD	Anggaran : 125.000.000
208	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Permohonan Betonisasi Jalan Lingkungan Rt. 02 Rw. 07 Desa Gribig	1 paket	Rt. 02 Rw. 07 Desa Gribig, Kab. Kudus, Gebog, Gribig	BPPKAD	Anggaran : 120.000.000
209	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Betonisasi Talud dan Renovasi Pagar Makam Eka Bhakti Winong	1 paket	Desa Gribig Rw. 1, Kab. Kudus, Gebog, Gribig	BPPKAD	Anggaran : -
210	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pemberian Pembangunan Pagar Makam Singolelo Gribig	1 paket	Desa Gribig Rw. 3, Kab. Kudus, Gribig	BPPKAD	Anggaran : 125.000.000
211	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Sarana Pelatihan Pemberdayaan masyarakat di Desa Gribig	1 paket	Desa Gribig, Kab. Kudus, Gebog, Gribig	BPPKAD	Anggaran : -
212	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Kios Desa Karangbener	1 paket	RT.04 RW.05 Desa Karangbener, Kab. Kudus, Bae, Karangbener	BPPKAD	Anggaran : -
213	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Dusun Kayuapu Gg.20	1 paket	Dusun Kayuapu Gg.20 RT.02 RW.11, Kab. Kudus, Bae, Karangbener	BPPKAD	Anggaran : -
214	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Peninggian dan Batasan Lapangan Sepakbola	1 paket	Desa Temulus RT.03 RW.03, Kab. Kudus, Mejobo, Temulus	BPPKAD	Anggaran : -
215	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Umum Randu Dukuh Durenan RT.03 RW.01 Desa Mejobo	1 paket	Dukuh Durenan RT.03 RW. 01 Desa Mejobo, Kab. Kudus, Mejobo, Mejobo	BPPKAD	Anggaran : -
216	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Ds. Bakalan Krapyak Rt 02 Rw 03 Kec.Kaliwungu	1 paket	Rt 02 Rw 03, Kab. Kudus, Kaliwungu, Bakalankrapyak	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
217	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan jalan Rw.05 Ds.Japan Kec.Dawe	1 paket	Rw.05, Kab. Kudus, Dawe, Japan	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000

1	2	3	4	5	6	7
218	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Jalan Rw04 Ds.Japan Kec.Dawe	1 paket	Rw.04. Kab. Kudus, Dawe, Japan	BPPKAD	Anggaran : -
219	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud makam mbah banteng desa Getas Rw 02	1 paket	Rw 02, Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	BPPKAD	Anggaran : -
220	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran air Rt01/Rw02 dukuh tanjung Ds.Bekatan Krapyak Kec. kaliwungu	1 paket	Rt01/Rw02 dukuh tanjung, Kab. Kudus, Kaliwungu, Bakalankrapyak	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
221	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengecoran jalan Rt06/Rw04 dukuh gamboran Ds.Bakalan Krapyak Kec.Kaliwungu	1 paket	Rt06/Rw04 dukuh gamboran, Kab. Kudus, Kaliwungu, Bakalankrapyak	BPPKAD	Anggaran : -
222	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan jalan RW 02 Ds.Bakalan Krapyak Kec.Kaliwungu	1 paket	RW 02 Ds.Bakalan Krapyak Kec.Kaliwungu, Kab. Kudus, Kaliwungu, Bakalankrapyak	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
223	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Jalan Rw04 Ds.Japan Kec.Dawe	1 paket	Rw 04 Ds.Japan Kec.Dawe, Kab. Kudus, Dawe, Japan	BPPKAD	Anggaran : -
224	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Jalan Rw 03 Ds.Japan Kec.Dawe	1 paket	Rw 03 Ds.Japan Kec.Dawe, Kab. Kudus, Dawe, Japan	BPPKAD	Anggaran : -
225	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan jalan Rw.05 Ds.Japan Kec.Dawe	1 paket	Rw.05 Ds.Japan Kec.Dawe, Kab. Kudus, Dawe, Japan	BPPKAD	Anggaran : -
226	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Talud Tk Pertiwi Ds.Krandon Kec.Kota	1 paket	Tk Pertiwi Ds.Krandon Kec.Kota, Kab. Kudus, Kota Kudus, Krandon	BPPKAD	Anggaran : -
227	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pengurukan lapangan cengkir manis	1 paket	lapangan cengkir manis prambatan lor, Kab. Kudus, Kaliwungu, Prambatan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
228	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Jalan RW 1 Desa Peganjaran	1 paket	Desa Peganjaran RW 1 Kec Bae Kab Kudus, Kab. Kudus, Bae, Peganjaran	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
229	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan jalan samben ke masen desa karangmalang kec. gebog yang kondi sinyu sudah mulai rusak	1 paket	Ds. Krangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus, Kab. Kudus, Gebog, Karangmalang	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
230	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Betonisasi Jalan Rabat Ngembai Kulon	1 paket	Desa Ngembai Kulon Kec. Jati Kab. Kudus, Kab. Kudus, Jati, Ngembai Kulon	BPPKAD	Anggaran : 300.000.000

1	2	3	4	5	6	7
231	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Rehabilitasi Saluran Air Desa Rendeng Rt 1, Rt 2, Rt 3 RW 1 Kec. Kota Kab. Kudus	1 paket	Desa Rendeng Kec. Kota Kab. Kudus, Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	BPPKAD	Anggaran : -
232	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk betonisasi jalan RT 2 dan RT 3 RW 1 Kec. Kota Kab. Kudus	1 paket	Desa Rendeng RW 1 Kec. Kota Kab. Kudus, Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng	BPPKAD	Anggaran : -
233	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran irigasi Blok Sigorok Desa Jati Kulon	1 paket	Desa Jati Kulon, Kab. Kudus, Jati, Jati Kulon	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
234	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud RW.01,02 Desa Ploso	1 paket	RW.01 dan RW.02, Kab. Kudus, Jati, Ploso	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
235	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Tanggul RW.12 Desa Pasuruhan Lor	1 paket	RW 12, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
236	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran Air RT.02,03 RW.01	1 paket	RT.02.03 RW.01, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : 150.000.000
237	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Ploso	1 paket	Desa Ploso, Kab. Kudus, Jati, Ploso	BPPKAD	Anggaran : -
238	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud RW.1 dan RW.2	1 paket	RW. 1 dan RW. 2 Ploso, Kab. Kudus, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : -
239	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Tanggul RW 12 Pasuruhan Lor	1 paket	RW.12 Pasuruhan Lor, Kab. Kudus, Jati, Jati, Seluruh Kelurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : -
240	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Saluran Air RW.1 RT.2 dan 3 Pasuruhan Lor	1 paket	RW.1 Pasuruhan Lor, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
241	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pagar Makam Ploso	1 paket	Ploso, Kab. Kudus, Jati, Ploso	BPPKAD	Anggaran : -
242	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan jalan RW.03 Loram Kulon	1 paket	RW.03 Loram Kulon, Kab. Kudus, Jati, Loram Kulon	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
243	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pengaspalan jalan RW. 01 Jati Kulon	1 paket	RW.1 Jati Kulon, Kab. Kudus, Jati, Jati Kulon	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000

1	2	3	4	5	6	7
244	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan jalan RW.2 Pasuruan Kidul	1 paket	RW.2 Pasuruan Kidul, Kab. Kudus, Jati, Pasuruhan Kidul	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
245	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan jalan RW.3 desa Krandon	1 paket	RW.3 Krandon, Kab. Kudus, Kota Kudus, Krandon	BPPKAD	Anggaran :
246	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Saluran Air Jl. KH. Asnawi (depan PAUD) Muslimat	1 paket	Jl. Kiyai Asnawi Krandon, Kab. Kudus, Kota Kudus, Krandon	BPPKAD	Anggaran :
247	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan saluran air Dukuh Kafiyoso RT. 05 RW. 06 Desa Karangrowo Undaan Kudus	1 paket	Desa Karangrowo, Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo	BPPKAD	Anggaran :
248	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan jalan Desa Wates RT. 03 RW. 03 Gang Rajawali	1 paket	Desa Wates, Kab. Kudus, Undaan, Wates	BPPKAD	Anggaran :
249	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah pemberian Bantuan keuangan desa untuk pembangunan jalan Dukuh Karangrejo RT. 03 RW. 04 Desa Ngemplak Undaan Kudus	1 paket	Desa Ngemplak, Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
250	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah pemberian Bantuan keuangan desa pembangunan jalan Desa Ngembalrejo RT. 03 dan 04 RW. 05	1 paket	Desa Ngembalrejo, Kab. Kudus, Bee, Ngembalrejo	BPPKAD	Anggaran :
251	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian bantuan keuangan RW 3 dan 4 Desa Karangrowo	1 paket	Desa Karangrowo, Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo	BPPKAD	Anggaran :
252	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian bantuan keuangan RW 2 s/d 10 Desa Tanjungrejo Jekulo	1 paket	Desa Tanjungrejo, Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo	BPPKAD	Anggaran :
253	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan RW 5 dan 6 Desa Karangrowo	1 paket	RW 5 dan 6 Desa Karangrowo, Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo	BPPKAD	Anggaran :
254	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan RW 4 Desa Tanjungrejo	1 paket	RW 4 Desa Tanjungrejo, Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo	BPPKAD	Anggaran :
255	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Rehabilitasi Pasar Desa (Sate Pakeng)	1 paket	Desa Gulang, Kab. Kudus, Gulang	BPPKAD	Anggaran :
256	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pasar Jepang (lanjutan)	1 paket	Desa Jepang, Kab. Kudus, Majobo, Jepang	BPPKAD	Anggaran :

1	2	3	4	5	6	7
257	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Islam Ngasem Jepang	1 paket	Desa Jepang, Kab. Kudus, Mejobo, Mejobo, Seluruh Kalurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : -
258	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Islam RW II Jl. Lingkar Jepang	1 paket	Desa Jepang RT 01 RW II, Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
259	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan jalan Kav. Bumi Makmur Dk. Gamboran RT 06 RW 04 Bakalan Krapyak	1 paket	Desa Bakalan Krapyak RT 06 RW 04, Kab. Kudus, Kaliwungu, Bakalankrapyak	BPPKAD	Anggaran : -
260	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Islam Suryono RT 03 RW 04	1 paket	Desa Payaman RT 03 RW 04, Kab. Kudus, Mejobo, Payaman	BPPKAD	Anggaran : 75.000.000
261	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Mushola Makam Eyang Rowijoyo Pajajaran	1 paket	Mejobo, Kab. Kudus, Mejobo, Mejobo	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
262	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Tambak Romo RT 01 RW 02 Golantepus	1 paket	Desa Golantepus RT 01 RW 02, Kab. Kudus, Mejobo, Golantepus	BPPKAD	Anggaran : 75.000.000
263	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan pagar makam islam Ragil	1 paket	Desa Jepang RT 04 RW 12, Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	BPPKAD	Anggaran : -
264	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar makam islam Gendhot	1 paket	Desa Jepang RT 02 RW 10, Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
265	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Islam desa Jepang RT02/RW10	1 paket	RT02/RW10, Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	BPPKAD	Anggaran : -
266	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Rehabilitasi Pasar Desa (Sate Pekeng) Guiang	1 paket	Desa Gulang, Kab. Kudus, Mejobo, Gulang	BPPKAD	Anggaran : -
267	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pasar Jepang (Lanjutan)	1 paket	Desa Jepang, Kab. Kudus, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : -
268	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Islam Ngasem Jepang	1 paket	Desa Jepang, Kab. Kudus, Jepang	BPPKAD	Anggaran : -
269	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Islam RWII Jl. Lingkar Jepang	1 paket	Jl. Lingkar RW II, Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	BPPKAD	Anggaran : -

1	2	3	4	5	6	7
270	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jl. Kavling Bumi Makmur Dk. Gaboran RT08/RW04 Desa Bakalan Krapyak	1 paket	Jl. Kavling Bumi Makmur Dk. Gaboran RT08/RW04, Kab. Kudus, Kaliwungu, Bakalankrapyak	BPPKAD	Anggaran : -
271	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan pagar/saluran Lapangan Gelanggang Pancasila Desa Jepang	1 paket	Desa Jepang, Kab. Kudus, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	BPPKAD	Anggaran : -
272	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Pagar Makam Islam Ragil Jepang RT04/RW12 Desa Jepang	1 paket	Desa Jepang RT04/RW12, Kab. Kudus, Mejobo, Jepang	BPPKAD	Anggaran : 50.000.000
273	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan gorong-gorong saluran pembuangan air gandongan	1 paket	Desa Temulus, Kab. Kudus, Mejobo, Temulus	BPPKAD	Anggaran : -
274	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan taman WJS (Wisata Jeratun Seluna) Jalan Mejobo batas pati desa temulus	1 paket	WJS (Wisata Jeratun Seluna) Jalan Mejobo batas pati desa temulus, Kab. Kudus, Mejobo, Temulus	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
275	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan Sotrono Desa Padurenan Gebog Kudus	1 paket	Desa Padurenan, Kab. Kudus, Gebog, Padurenan	BPPKAD	Anggaran : -
276	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Saluran Drainase Jalan Sotrono Desa Padurenan Gebog Kudus	1 paket	Desa Padurenan Kec. Gebog, Kab. Kudus, Gebog, Padurenan	BPPKAD	Anggaran : -
277	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan Sandaran makam Desa Padurenan	1 paket	Padurenan, Kab. Kudus, Gebog, Padurenan	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
278	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan gedung serbaguna Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kab. Kudus . dalam rangka meningkatkan sarpras Desa. untuk pertemuan Masyarakat.	1 paket	Gang 12, Desa Undaan Lor RT.007 RW.002, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Lor	BPPKAD	Anggaran : 500.000.000
279	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan betonisasi/perluanya peningkatan sarpras Desa di Desa Glagah jalan Desa RW.4 dan RW.5 desa Glagah waru dalam rangka meningkatkan sarpras desa.	1 paket	RW.4 dan 5 Glagah waru, Kab. Kudus, Undaan, Glagahwaru	BPPKAD	Anggaran : 200.000.000
280	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pengecoran jalan gang 7 Undaan Lor untuk meningkatkan sarpras desa.	1 paket	Gang 7 Undaan Lor, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
281	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pengecoran bahu jalan kampung gang 5 dalam rangka meningkatkan sarpras di desa	1 paket	Gang 5 Undaan lor, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
282	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pengadaan perahu dan mesin perahu untuk meningkatkan tanggap bencana di desa. karena desa Undaan lor rawan bencana	1 paket	undaan Lor gang 12, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Lor	BPPKAD	Anggaran : -

1	2	3	4	5	6	7
284	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan saluran gang 28 undaan lor undaan Kudus untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi	1 paket	undaan lor gang 28, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
285	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan saluran gang 3 Desa Undaan Lor Undaan Kudus dalam rangka meningkatkan lingkungan yang bersih	1 paket	Undaan Lor RT.3 RW,1, Kab. Kudus, Undaan, Undaan Lor	BPPKAD	Anggaran : -
286	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Talud Jalan Dukuh Guono Rw. 02 Desa Dukuhwaringin	1 paket	Pembangunan Talud Jalan Dukuh Guono Rw. 02 Desa Dukuhwaringin, Kab. Kudus, Dawe, Dukuhwaringin	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000
287	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH /Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk pembuatan Pasangan Talud Rw. 02 Desa Cranggang	1 paket	Pasangan Talud Rw. 02 Dasa Cranggang, Kab. Kudus, Dawe, Cranggang	BPPKAD	Anggaran : 100.000.000

Bahwa sebagian besar usulan masyarakat sudah diakomodir pada sub kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakat Indonesia di berbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetap, mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumberdaya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (propenas) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah untuk melaksanakan kewenangannya yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan,, pekerjaan umum, penataan ruang, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan di daerah, Kabupaten Kudus menyusun RPJMD dengan mengacu RPJMN. Pemerintah Kabupaten Kudus juga menyusun RKPD setiap tahun yang dijabarkan oleh seluruh Perangkat daerah. Seluruh Perangkat daerah menyusun Renja-PD sehingga terjalin hubungan keselarasan dari proses perencanaan program kegiatan dan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan dengan tetap berpedoman kepada Kebijakan Nasional, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	APBN	
2	Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	APBN	
3	Kapasitas Keuangan Daerah	APBN	
4	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	APBN	

Berdasarkan keempat Kebijakan Nasional tersebut, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus mengacu kepada ‘Kapasitas Keuangan Daerah’. Secara umum, prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Namun, masih diperlukan sistem dan mekanisme yang efektif untuk implementasi program-program pembangunan secara terpadu dan terarah.

Sebagai kelanjutan dari capaian yang telah diperoleh dan permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan pembangunan berkelanjutan tahun 2023 adalah :

- 1) Menjabarkan secara konkrit unsur-unsur pembangunan dan pola hubungan untuk memastikan berbagai pemangku kepentingan dan mempercepat internalisasi prinsip pembangunan.
- 2) Menyepakati ukuran-ukuran yang tepat sehingga pembangunan berkelanjutan dapat berjalan nyata.

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi tugas dan pokok fungsi BPPKAD ada lima yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan operasional pendapatan daerah, anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, perbendaharaan, otorisasi dan pembiayaan, akuntansi, pembukuan,

- pembinaan dan manajemen keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah;
- 5) Pamantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
 - 6) Pelaksanaan kesekretariatan Badan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPPKAD

Berdasarkan Visi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Periode Tahun 2018-2023 yaitu **“KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODEREN, RELEGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA**“, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
- 3) Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif
- 4) Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah diatas, BPPKAD melaksanakan ***misi kedua yaitu mewujudkan pemerintahan yang handal untuk peningkatan pelayanan publik.*** BPPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam mengelola keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan dan belanja di era pandemi covid-19, belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib/rutin, serta pada upaya pemulihan pandemi covid-19 antara lain pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem jaringan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sedangkan di bidang pendapatan melakukan optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja BPPKAD Tahun 2023 adalah :

“Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah”

Sedangkan sasaran rencana kerja yang akan diwujudkan pada tahun 2023 adalah :

1. Meningkatkan PAD
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah. BPPKAD dalam melaksanakan kewenangannya melaksanakan kebijakan daerah dibidang keuangan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan BPPKAD dalam merumuskan program dan kegiatan disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPPKAD, juga mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Renstra BPPKAD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BPPKAD melaksanakan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan dengan Rencana program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah terdiri dari 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024											
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
5																12.616.500.000						
5	02						308.879.462.144									1.683.500.000						
5	02	01					20.609.281.735															
5	02	01	2.01				19.035.850									32.000.000						
5	02	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	9 Dokumen	15 Dokumen	10.476.275	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	9 Dokumen	15 Dokumen	12.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	6 Laporan	15 Dokumen	8.559.375	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	6 Laporan	15 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.214.702.500			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							120.500.000	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	75 Orang/bulan	5 Dokumen	19.085.240.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	75 Orang/bulan	5 Dokumen	18.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	1 Dok	5 Dokumen	125.257.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	1 Dok	5 Dokumen	95.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	8 Dok	5 Dokumen	4.205.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	8 Dok	5 Dokumen	7.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah						245.773.650			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah							45.000.000	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	6 Orang	1 Dokumen	245.773.650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	6 Orang	1 Dokumen	45.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						246.934.985			Administrasi Umum Perangkat Daerah							315.000.000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	24 Paket	100 persen	2.617.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	24 Paket	100 persen	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	81 Paket	100 persen	47.053.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	81 Paket	100 persen	65.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024								
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	33 Paket	100 persen	8.072.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	33 Paket	100 persen	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	14 Paket	100 persen	28.729.785	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	14 Paket	100 persen	55.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	17 Paket	100 persen	20.683.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	17 Paket	100 persen	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	2 Dok	100 persen	4.608.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	2 Dok	100 persen	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Indeks	25 Lap	100 persen	135.172.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Indeks	25 Lap	100 persen	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	01	2.07		Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				250.000.000			
5	02	01	2.07	10	Penggadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	1 Unit	1 Unit	12.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penggadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	1 Unit	1 Unit	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				603.048.250			
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	2 Lap	12 Laporan	9.090.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	2 Lap	12 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	2 Lap	12 Laporan	32.747.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	2 Lap	12 Laporan	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	12 Lap	12 Laporan	561.211.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	12 Lap	12 Laporan	575.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				291.000.000			
5	02	01	2.09	02	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	129 Unit	184 Unit	183.074.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	129 Unit	184 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024							
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5	02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	15 Unit	184 Unit	3.505.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	15 Unit	184 Unit	3.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	10 Unit	184 Unit	19.681.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	10 Unit	184 Unit	22.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	30 Unit	184 Unit	61.606.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	85 Indeks	30 Unit	184 Unit	65.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					284.435.109.820		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					7.064.000.000				
			persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			100%					persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				100%			
			Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan			100%					Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan				100%			
			Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan perundang-undangan			100%					Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan perundang-undangan				100%			
			Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan			100%					Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan				100%			
			Capaian realisasi pembayaran belanja PD			95%					Capaian realisasi pembayaran belanja PD				95%			
			Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan			100%					Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan				100%			
5	02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					954.602.340		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.050.000.000				
5	02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	2 Dokumen	8 Dokumen	286.901.640	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	2 Dokumen	8 Dokumen	315.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	2 Dokumen	8 Dokumen	157.184.220	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		100 persen	2 Dokumen	8 Dokumen	160.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024									
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	2 Dokumen	8 Dokumen	312.172.640	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	2 Dokumen	8 Dokumen	350.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	2 Dokumen	8 Dokumen	198.343.840	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	2 Dokumen	8 Dokumen	225.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						230.023.980			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						145.000.000	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	95 persen	10 Dokumen	12 Dokumen	98.396.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	95 persen	3 Kali		30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	95 persen	70 Laporan	12 Dokumen	44.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	95 persen	70 Laporan	95 %	55.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	95 persen	24 Kali 6.954 SP2D	12 Dokumen	20.943.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	95 persen	24 Kali 6.954 SP2D	95 %	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	95 persen	7 Dok 6 Kali	12 Dokumen	66.684.980	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	95 persen	7 Dok 6 Kali	95 %	35.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						560.426.500			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						604.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024						
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	18 Laporan	1 Dokumen	62.670.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	18 Laporan	1 Dokumen	64.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Laporan	1 Dokumen	220.999.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Laporan	1 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	3 Dokumen	1 Dokumen	264.325.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	3 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.766.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.666.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					282.690.067.000		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					5.265.000.000				
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	36 Dokumen	259.819.384.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	36 Dokumen	265.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	36 Dokumen	4.000.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	36 Dokumen	5.000.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	36 Dokumen	18.870.673.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	36 Dokumen	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.063.798.094		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.153.500.000				
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.063.798.094		Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.153.500.000				
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	90 persen	3 Dokumen	12 Dokumen	105.602.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	90 persen	3 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024										
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
				Program	Kejuaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Kejuaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	90 persen	1 Dokumen	12 Dokumen	19.977.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	90 persen	1 Dokumen	12 Dokumen	17.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	90 persen	1 Dokumen	12 Dokumen	4.570.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	90 persen	1 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kelurahan	90 persen	6 Laporan	12 Dokumen	100.000.294	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kelurahan	90 persen	6 Laporan	12 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	900 Sertifikat	12 Dokumen	1.760.360.550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	900 Sertifikat	12 Dokumen	1.875.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	1 Laporan	12 Dokumen	12.706.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	1 Laporan	12 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	90 persen	2 Dokumen	12 Dokumen	60.579.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	90 persen	2 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah											Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										
5	02	04	2.01								1.771.272.495									1.917.500.000	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	2 Dokumen	374 Miliar	25.806.560	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	2 Dokumen	374 Miliar	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Dokumen	374 Miliar	163.105.940	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Dokumen	374 Miliar	170.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Laporan	374 Miliar	96.523.265	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Laporan	374 Miliar	110.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024										
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Unit	374 Miliar	13.277.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Unit	374 Miliar	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	15000 OP/WP	374 Miliar	27.460.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	15000 OP/WP	374 Miliar	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Laporan	374 Miliar	65.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Laporan	374 Miliar	110.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHBTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	16 Obyek Pajak	374 Miliar	10.442.850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	16 Obyek Pajak	374 Miliar	11.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	399000 Dok	374 Miliar	150.272.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	399000 Dok	374 Miliar	160.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	22500 Layanan	374 Miliar	38.447.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	22500 Layanan	374 Miliar	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Dokumen	374 Miliar	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	1 Dokumen	374 Miliar	7.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	374 Miliar	778.414.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	374 Miliar	800.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	60 Dokumen	374 Miliar	4.196.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	100 persen	60 Dokumen	374 Miliar	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	374 Miliar	355.569.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	374 Miliar	400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	374 Miliar	2.804.640	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	374 Miliar	3.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	374 Miliar	33.933.640	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	374 Miliar	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
TOTAL											308.879.462.144									12.818.500.000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Data Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Rencana Kerja (Renja) BPPKAD memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran.

Renja BPPKAD Tahun 2023 ikut serta mendukung mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang merupakan implementasi tahun keempat visi Bupati Kudus yaitu “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Relegius, Cerdas dan Sejahtera” serta melaksanakan misi kedua “mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik”. Pada Tahun 2023 Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merencanakan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub. kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 308.879.462.144 dengan rincian:

1. Rp. 20.609.281.735 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Rp. 284.435.109.820 untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Rp. 2.063.798.094 untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Rp. 1.771.272.494 untuk Program Pengelolaan Pendapatan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang ada ini masih jauh dari sempurna, dan membutuhkan kritik dan saran yang dapat membantu penyempurnaannya di masa datang.

Kudus, 2022
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS


EKO DJUMARTONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19681004 199303 1 006